

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOPPENG**

Diajukan Oleh

SAYIDAH MARYAM SINOSI

4511013057



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

Nama Mahasiswa : Sayidah Maryam Sinosi

Stambuk/NIM : 4517013057

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



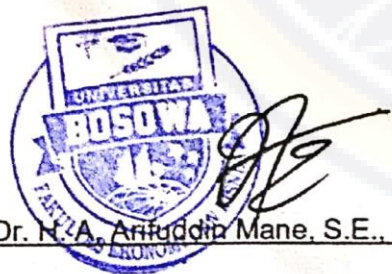
Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak., CA

Tharwan, SE., M.Si., AK., CA

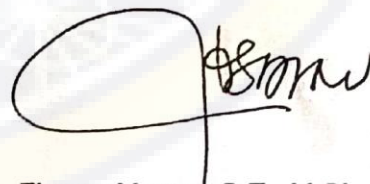
Mengetahui dan Mengesakan:

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Akuntansi



Dr. N.A. Antuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H



Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan.....

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAYIDAH MARYAM SINOSI
Nim : 4517013057
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar psutaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 04 Februari 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



Sayidah Maryam Sinosi

**AN ANALYSIS OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT
BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 71 YEAR 2010 IN THE
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE OF SOPPENG REGENCY**

By:

SAYIDAH MARYAM SINOSI

Department of Accounting Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

SAYIDAH MARYAM SINOSI. 2021. Undergraduate Thesis. An Analysis of the Presentation of Financial Statement Based on Government Regulation Number 71 Year 2010 in the Department of Education and Culture of Soppeng Regency. Supervised by Dr. Firman Manne, SE., M.Si. Ak. CA and Thanwain, SE., M.Si. Ak. CA.

This study aims to find out and provide an overview of the presentation of financial statement based on Government Regulation Number 71 Year 2010 in the Department of Education and Culture of Soppeng Regency.

The object of this study is the Department of Education and Culture of Soppeng Regency. This study was a qualitative study with a descriptive-comparative method. The data were obtained from observations, interviews, and documentation in the Department of Education and Culture of Soppeng Regency.

In the end, the results of this study depict that the presentation of financial statement in the Department of Education and Culture is in accordance with Government Regulation Number 71 Year 2010. Furthermore, this presentation applies an accrual and a cash basis. The accrual basis is used in the financial statement for revenue recognition-Operational Report (LO), expenses, assets, liabilities, and equity. On the contrary, the cash basis is used for Budget Realization Report (LRA) revenue and expenditure.

Keywords: Analysis, Government Regulation Number 71 Year 2010, Financial Statement

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOPPENG**

Oleh:

SAYIDAH MARYAM SINOSI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

SAYIDAH MARYAM SINOSI. 2021. Skripsi. Analisis Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dibimbing oleh Dr.Firman Manne, SE., M.Si. Ak. CA dan Thanwain, SE., M.Si. Ak. CA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

Objek penelitian adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Data yang diperoleh yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menggunakan basis akrual dan basis kas. Basis akrual yang digunakan dalam pelaporan keuangan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan, basis kas untuk pendapatan LRA dan belanja.

Kata Kunci: Analisis, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat yang hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SWA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa, dengan mengambil judul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng”.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Firman Manne, SE. M.Si., Ak. CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Firman Manne, SE. M.Si., Ak. CA dan Bapak Thanwain, SE. M.Si., Ak. CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, seta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa

bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.

6. Kepada Ibu Hasnah, MM sebagai Kapala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Sinosi, Ibunda Emmi dan Kakak Amirul Akram Sinosi atas kasih sayang dan semangat yang tiada henti, serta pengorbanan yang tak terhingga sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang ini. Semoga rahmat Allah SWT memberikan umur yang panjang dan keselamatan dunia akhirat.
8. Teruntuk sahabatku Rahasia Negara (RN), Yayay, Ivha, Nataya, Amparita terima kasih selalu ada dalam suka dan duka penulis yang telah setia menemani sejak dibangku sekolah menengah pertama, semoga kalian sehat selalu dan bisa mencapai cita-cita yang diinginkan.
9. Sahabatku A.Idha Dwi Muliani yang telah banyak membantu dalam mengerjakan skripsi ini walaupun sangat slow respon dan sahabat ARMYku A.Besse Witma yang setia mendengar kehaluan penulis.
10. Ucapan terima kasih kepada BTS, RM, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V, Jk atas dukungan yang diberikan kepada penulis secara tidak langsung melalui karya-karya.
11. Teman-teman Angkatan 2017 teruntuk kelas Akuntansi B dan Bikini Bottom yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Makassar, 04 Februari 2021

Penulis

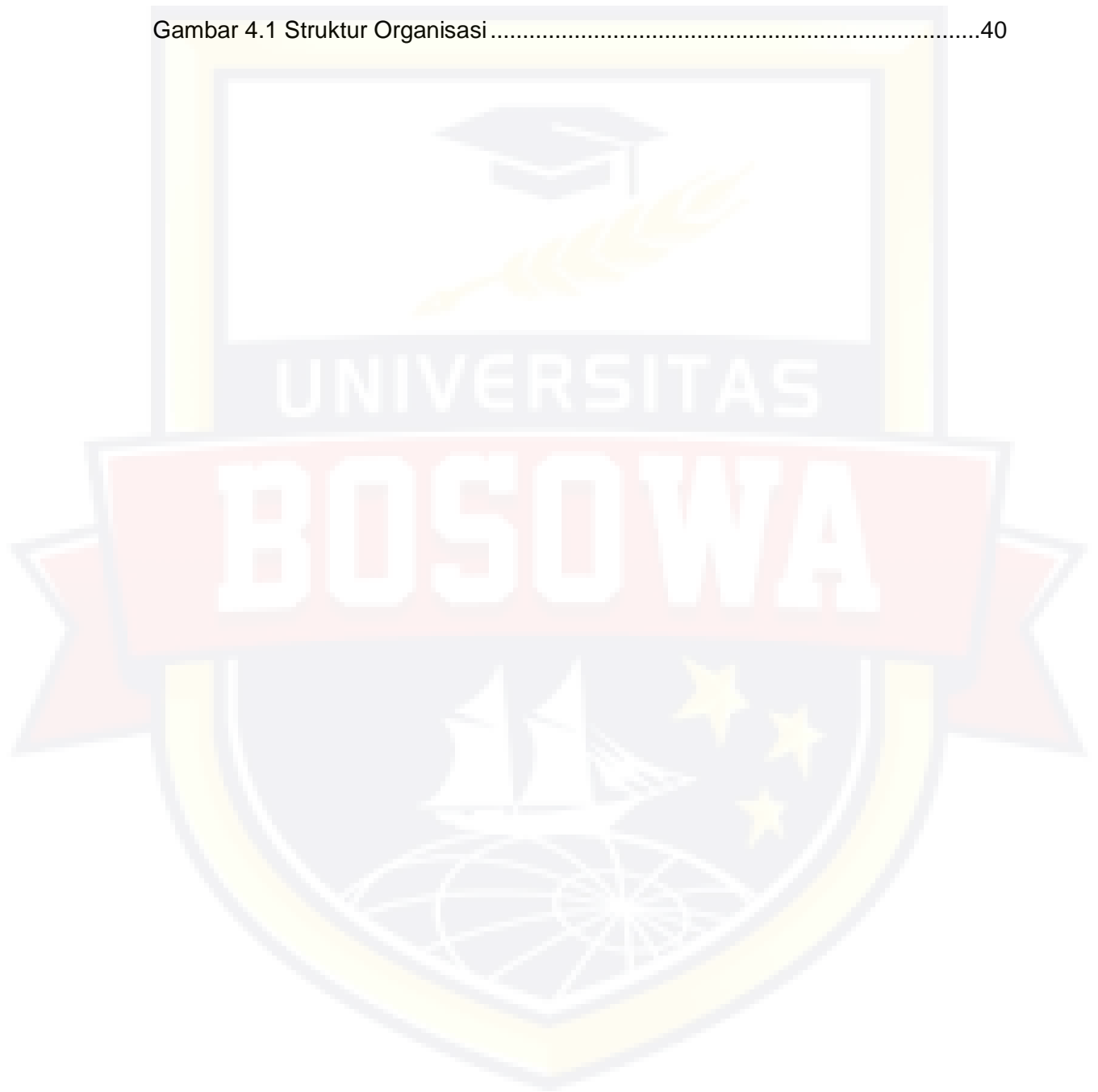
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	15
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah.....	16
2.1.4 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	17
2.1.5 Laporan Keuangan	20
2.1.6 PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan	24
2.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	25
2.1.8 Komponen Laporan Keuangan.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Pikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.2.1 Jenis Data	33
3.2.2 Sumber Data	33
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
3.4 Metode Analisis	35
3.5 Definisi Operasional	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Instansi	38
4.1.1 Sejarah Singkat Instansi Pemerintah	39
4.1.2 Visi dan Misi Intansi	40
4.1.3 Struktur Organisasi	40
4.1.4 Uraian Tugas	41
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
4.2.1 Penjelasan Gambaran Umum Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng	43
4.2.2 Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	47
4.2.3 Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Sektor Publik	11
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	40



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	14
Tabel 2.2 Perbedaan komponen laporan keuangan antara PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.....	30
Tabel 4.1 Rincian Aset.....	49
Tabel 4.2 Rincian Aset Lancar.....	50
Tabel 4.3 Rincian Aset Tetap	52
Tabel 4.4 Rincian Akumulasi Penyusutan.....	54
Tabel 4.5 Rincian Aset Lainnya	55
Tabel 4.6 Rincian Pendapatan	57
Tabel 4.7 Rincian Rincian Pendapatan Asli Daerah	58
Tabel 4.8 Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	58
Tabel 4.9 Rincian Pendapatan Asli Daerah	58

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....

Lampiran 2 : Neraca.....

Lampiran 3 : Laporan Operasional (LO)

Lampiran 4 : Laporan Perubahan Ekuitas



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan Indonesia terutama pada bidang-bidang tertentu, seperti sektor yang berfokus pada pengelolaan publik dapat ditandai dengan keberadaan tuntutan masyarakat yang bersifat akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga dan instansi publik, baik yang berada di pemerintahan pusat maupun daerah. Reformasi ini sangat memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi khususnya sektor publik, dengan berbagai cara agar tercapai sistem akuntansi pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya. Pemerintah harus mengerjakan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang digunakan sehingga keuangan suatu negara dapat mengalami berbagai macam perubahan mendasar dalam bidang-bidang tertentu yang tentunya dapat memberi dampak positif berupa dukungan reformasi, yang mana dapat meningkatkan jalannya suatu sistem keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh perubahan yang paling penting yaitu pada bidang akuntansi termasuk pada bagian pemerintahan.

Perubahan yang terjadi pada bidang akuntansi pemerintah ditandai dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mencakup basis kas yaitu untuk pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban dan

ekuitas. Kedua basis tersebut digunakan untuk merencanakan sebuah pelaporan keuangan sehingga pemerintah dapat melakukan peran aktif pada pemerintah daerah dalam mengelola daerah tersebut.

Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyediakan sebuah informasi yang bersifat kuantitatif khususnya yang bersifat keuangan dari sebuah entitas pemerintah dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi yang nalar dari berbagai pihak yang berkepentingan yang berdasar atas berbagai alternatif tindakan (Hallm, 2007). Tugas akuntansi pemerintahan dan keuangan pemerintahan sangat berkaitan, maka dari itu sistem dan proses yang selama ini diaplikasikan dalam akuntansi pemerintahan telah menimbulkan berbagai masalah yang menghambat tercapainya *good governance* dalam perealisasi sistem pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam mengelola daerah tersendiri, karena merupakan tantangan yang memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah demi dicapainya pembangunan dan pengelolaan sistem daerah yang bekerja semestinya.

Hak dan kewajiban daerah sudah sepenuhnya diambil alih dan berada penuh dibawah kendali suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola kemampuan finansial suatu daerah, dimana hal tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa faktor diantaranya ialah pembuatan skema atau rencana, kemudian bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan, penatausahaan, pemberian laporan mengenai sistem yang telah direalisasikan, dan juga adanya tanggung jawab serta dana yang terus berada dalam pengawasan.

Salah satu bagian dari pemerintahan yang termasuk dalam lingkup hak pengelolaan ialah adanya kemampuan pemerintah untuk mengadakan pajak

pada suatu daerah, disusul dengan adanya retribusi dan juga pemberian pinjaman, hak dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yakni dengan melakukan pembayaran tagihan terhadap pihak luar yang juga memiliki kepentingan. Hak untuk pemerintah daerah, dibagi menjadi beberapa poin penting, yang mencakup hak untuk mengeluarkan dana pada proyek tertentu, hak untuk mengelola sumber daya daerah yang tentu saja dapat dilaksanakan secara mandiri maupun dengan adanya campur tangan pihak ketiga atau lebih, hal inilah yang mencakup surat berharga, piutang, uang, materi, dan juga beberapa hak lain yang memiliki nilai jual setara, salah satunya ialah materi yang tidak termasuk pada perusahaan daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyajikan sebuah pengetahuan finansial yang mana sangat dibutuhkan keberadaannya secara spesifik, akurat, selalu ada di waktu yang tepat, dan memiliki kredibilitas yang tinggi.

Penerapan skema struktur akuntansi pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan melalui peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Berdasarkan peraturan tersebut, Standar akuntansi pemerintah merupakan sebuah prinsip akuntansi yang diaplikasikan pada penyusunan serta penyajian pelaporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP dan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam SAP Berbasisi AkruaI dimaksud berpedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 23,

bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAP No. 1 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang ingin mencapai tujuan berupa mengatur penyajian laporan keuangan untuk pencapaian bersama yakni menjadikan laporan keuangan yang universal sebagai upaya untuk meningkatkan perbandingan antara laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual.

Laporan keuangan sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan keuangan (CaLK) yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut-lah yang nantinya akan menjadi indikator atau standar kualitas kerja sistem pemerintahan daerah khususnya dalam bidang yang mengelola aset finansial.

Pada laporan keuangan, salah satu bagian yang merupakan paling penting dan keberadaannya wajib untuk ada dalam laporan keuangan yaitu track-record terhadap Catatan Laporan Keuangan atau biasa disebut CaLK yang merupakan ungkapan naratif dari komponen pelaporan keuangan, sehingga dapat dipahami serta mudah dimengerti oleh *stakeholders*.

Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Soppeng dalam tiga tahun terakhir turun temurun mengalami kenaikan yang positif dimana besaran yang menunjukkan keadaan yang diakibatkan oleh peranan sektor pertanian dan

konstruksi. Bukan hanya pada sektor, tetapi pembangunan jalanpun yang terus meningkat juga sehingga membantu mendorong naiknya perekonomian di Kabupaten Soppeng. Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tercatat sebesar 5,11%, dan tahun 2016 mencapai 8,14%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,2% sehingga pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 8,34%. (sumber: BPS 2018)

Kebijakan ekonomi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun Anggaran 2020 difokuskan untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Pentingnya substansi-substansi dapat melakukan sesuatu agar terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif dan bersifat continue atau tertus-menerus dalam berbagai batasan yang akan ditunjang oleh sumber yang memberikan kemampuan pendanaan daerah yang ada.

Faktanya, permasalahan yang sering timbul karena adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 seperti pos-pos atau item-item laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Oleh karena itu, pengadaan laporan keuangan pada instansi pemerintah diharapkan agar basis akuntansi yang digunakan sesuai dengan penerapan perlakuan akuntansi atas transaksi pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAK) Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Penelitian ini akan melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap hal yang dapat menyajikan laporan keuangan yang mengikuti apa yang tertera pada ketetapan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah ada, yakni adanya penerapan sifat kualitatif yang dimana keberadaannya didukung oleh metode analisis deskriptif komparatif. Selain itu, perbedaan terakhir yaitu pada objek penelitian. Dalam penelitian ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng sebagai objek penelitian ini. Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan adanya hasil yang dapat memaksimalkan penyajian laporan keuangan agar mengikuti ketetapan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia.

Berpatokan pada berbagai macam hal yang telah dijabarkan pada latar belakang, penulis-pun memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus tersebut dikarenakan penulis yang merasa hal ini sangatlah menarik hingga dilakukan-lah penelitian di Instansi Pemerintah khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaen Soppeng untuk mengetahui model dan juga bagaimana laporan keuangan daerah tersebut dijalankan. Berdasarkan hal tersebut-lah penulis-pun mengajukan judul yang bertajuk **“ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOPPENG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Jika melihat kembali berbagai hal yang telah dijabarkan pada latar bekalang diatas, penulis dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :
Apakah laporan keungan yang diaplikasikan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Soppeng sudah sepenuhnya mengikuti aturan perundang-undangan nomor 71 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpatokan pada poin penting yang dibahas pada rumusan masalah, dapat dikatakan bahwa tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah mendapatkan pengetahuan dan juga hasil analisis mengenai pengadaaan laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diraih setelah penelitian dilaksanakan, salah satunya ialah wawasan individu yang semakin luas mengenai bidang akuntansi pada sektor masyarakat. Manfaat lainnya diuraikan menjadi :

1. Manfaat terhadap penulis ialah bertambahnya ilmu pengetahuan dan juga pemahaman kompetensi terhadap akuntasnti sektor publik pada bidang pemerintahan yang berelevansi dengan pengadaaan laporan keuangan suatu instansi pemerintahan.
2. Bagi Instansi Pemerintahan, bertujuan sebagai tambahan informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Bagi Akademisi, Dapat dijadikan sebagai referensi kepada semua pihak yang sedang melakukan penelitian dan sebagai masukan ilmu

pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik khususnya pada bidang pemerintahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dikenal sebagai organisasi yang berkaitan pada pemerintahan. Organisasi dibuat dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan bersama dalam pengambilan keputusan.

Menurut Halim & Kusufi (2014:3) dalam buku Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik:

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintahan, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Bastian (2010:3) "Akuntansi sektor publik dijelaskan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada Lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan Yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerja sama antara sektor publik serta swasta.

Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan (Sartika, 2019).

Berdasarkan pengertian akuntansi sektor publik di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mengidentifikasi dan menganalisis laporan keuangan dalam suatu organisasi publik dalam tujuan pengambilan

keputusan untuk penyajian laporan keuangan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pengguna.

Menurut Mardiasmo (2018: 18) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993), tujuan Akuntansi Sektor Publik ada 2, yaitu:

1. Tujuan pertama yaitu memberikan informasi dengan tepat, efisien, dan ekonomi yang dipercayakan kepada organisasi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen.
2. Tujuan kedua yaitu memberikan informasi yang memungkinkan untuk pelaporan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif pada penggunaan sumber daya dan memungkinkan untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi dan penggunaan dana publik bagi pegawai pemerintah. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas.

Akuntansi sektor publik sebagai entitas yang memiliki keunikan tersendiri, karena memiliki sumber daya ekonomi yang entitas ekonominya sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam suatu organisasi pemerintah karena sistem akuntansi pemerintahan menyediakan informasi yang bertujuan dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Akuntansi sektor publik mencakup identifikasi proses manajerial dan pertanggung jawaban. Proses manajerial yang dimaksud yaitu mencakup anggaran, perencanaan, sedangkan pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu laporan keuangan mengenai laporan realisasi anggaran dan kegiatan organisasi. Organisasi publik berfokus pada peningkatan pelayanan yang berjangka panjang untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal dan mampu menyeimbangkan tujuan dan kepentingan dari masyarakat.

Menurut Jaminta Sinaga (2017), adapun peranan sektor publik yang dikemukakan menjadi beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Akuntansi sektor publik merupakan pengganti mata kuliah akuntansi pemerintahan.

2. Pergantian mata kuliah ini diawali dengan munculnya reformasi pemerintahan dan keuangan negara (Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999).
3. Munculnya Undang-Undang tersebut terbentuklah otonomi daerah terbatas yang memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumberdaya yang dimiliki daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri.
4. Akuntansi sektor publik menginginkan laporan keuangan publik yang transparan, akuntabel dan akurat yang dapat dipercaya oleh publik melalui pengawasan yang dilakukan pihak internal pemerintah secara terbuka dan berkeseimbangan secara terus menerus.
5. Bagian dari akuntansi sektor publik adalah akuntansi manajemen sektor publik, yang khusus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada publik melalui pihak internal pejabat publik.
6. Fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan merupakan fungsi utama manajemen sektor publik yang pada prinsipnya harus benar-benar dilakukan oleh pejabat atau pertanggungjawaban publik.
7. Penerimaan amanah harus memberikan akuntabilitas publik, baik akuntabilitas publik horizontal maupun vertikal.
8. Dalam menentukan biaya publik akuntansi sektor publik harus mengadopsi perhitungan biaya dengan sektor swasta dengan menambah metode yang lain, yang dapat menghitung cost pelayanan publik termasuk cost social yang sulit menentukan karena mempunyai jangkauan yang cukup luas.
9. Akuntansi manajemen sektor publik di Indonesia belum populer karena belum termasuk mata kuliah di Perguruan Tinggi secara terpisah dengan mata kuliah lain.
10. Untuk mendukung akuntansi sektor publik akuntansi manajemen sektor publik harus diawali dengan akuntansi biaya sektor publik di pemerintahan.
11. Akuntansi manajemen sektor publik belum berhasil membantu negara untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme.
12. Belum sepenuhnya hukum dipakai sebagai alat untuk menetapkan seorang itu bersalah atau tidak karena masih banyak dipengaruhi dengan berbagai kebijaksanaan untuk mengesampingkan penerapan hukum yang adil dan merata.

Dalam uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peranan akuntansi membuktikan bahwa akuntansi sektor publik sangat diperlukan pada sektor pemerintahan agar terwujudnya prinsip pemerintahan yang *good governance*. Menurut Mardiasmo (2018:16) untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik.

Reformasi kelembagaan berkaitan dengan seluruh bagian pemerintahan baik struktur dan infrastruktur, selain itu untuk mendukung tercapainya pemerintahan *good governance*, maka diperlukan berbagai reformasi lanjutan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2018: 23), Adapun karakteristik *good governance* menurut UNDP, sebagai berikut:

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu,
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dalam pengelolaan keuangan publik, bagian-bagian akuntansi sektor publik juga sangat dibutuhkan. Bagian tersebut digambarkan dalam siklus sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus Akuntansi Sektor Publik



Sumber: Bastian, 2010

Dalam siklus akuntansi sektor publik di atas, bahwa akuntansi sektor publik terdiri dari bagian-bagian (Bastian, 2010) sebagai berikut:

1. **Perencanaan Publik**
Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi.
2. **Penganggaran Publik**
Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh tiga faktor, yaitu (1) kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau Lembaga pelaksana tertinggi, (2) kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai Lembaga, (3) akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas prakiraan anggaran.
3. **Realisasi Anggaran Publik**
Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah rencanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran publik juga menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input atau output. Realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.
4. **Pengadaan Barang dan Jasa Publik**
Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses cara dan tindakan dalam menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Barang dan jasa yang disediakan dalam bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan demi kesejahteraan masyarakat.
Barang dan jasa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pengadaan barang dan jasa merupakan cara agar mendukung pelaksanaan strategi yang bertujuan sebagai kebijakan publik seperti mengembangkan UMKM.
5. **Pelaporan Keuangan Sektor Publik**
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan brealisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
6. **Audit Sektor Publik**
Dalam pembicaraan luas, pemeriksaan atau *auditing* merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelolaan sektor aset negara lainnya, atau organisasi publik nonpemerintah seperti partai politik, LSM, Yayasan dan organisasi ditempat peribadatan.

Menurut Mardiasmo (2018: 5) dalam buku akuntansi sektor publik:

Akuntansi sektor publik dinilai sebagai sarang efisiensi, pemborosan, sumber kebocoran, dan institusi yang selalu mengalami kerugian. Tuntutan muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value of money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value of money* merupakan konsep dasar dalam pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Karakteristik akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang erat dengan penerapan dan peranan akuntansi pada organisasi publik. Organisasi publik meliputi: badan pemerintahan (pusat dan daerah), LSM, organisasi politik, BUMN dan BUMD dan organisasi lainnya. Organisasi sektor publik berada dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi sebuah organisasi sektor publik meliputi sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Adapun faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu; tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP), pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, serta sektor informal.

2. Faktor politik

Adapun faktor politik yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu; ideologi negara, hubungan negara dengan masyarakat, jaringan internasional, dan kelembagaan.

3. Faktor kultural

Adapun faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu; keragaman suku, agama, ras, budaya dan Bahasa, sosiologi masyarakat, histories, tingkat Pendidikan dan karakteristik masyarakat.

4. Faktor demografi

Adapun faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik yaitu; pertumbuhan penduduk, migrasi, tingkat Kesehatan dan struktur usia penduduk.

Sifat karakteristik organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk mencapai tujuan yang harus bermanfaat.

Tabel 2.1
Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Tujuan	Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani
Aktivitas	Pelayanan publik (<i>public service</i>) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.
Sumber Pembiayaan	Berasal dari dana masyarakat/publik yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Pola Pertanggung-jawaban	Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti dalam organisasi pemerintah meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam Yayasan dan LSM seperti dewan pengampu.
Kultur Organisasi	Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.
Penyusunan Anggaran	Dilakukan Bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan anggaran program publik dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya, dipisahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRS, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau pengurus yayasan
Stakeholder	Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk Lembaga Donor Internasional (seperti Bank Dunia (<i>World bank</i>), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pemerintahan luar negeri.

Sumber: Buku Akuntansi Sektor Publik Suatu pengantar (Bastian, 2010)

2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Pada tahun 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan suatu negara. Bentuk beserta isi suatu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang diatur kedalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah pada tahun 2005 maka pertama kali Negara Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan.

PP No. 24 Tahun 2005 dialihkan menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah dan sebagai pengganti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Adapun perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan. Pencatatan/penjumlahan transaksi dibedakan menjadi 2 jenis jurnal sebagai berikut: jurnal anggaran dan jurnal finansial (Juliam dkk, 2015).

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan melalui peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikembangkan dari PP SAP sebelumnya yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada tahun 2013 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Peraturan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual sebagai pendukung Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Halim & Kusifi (2014: 227) “Standar akuntansi adalah acuan dalam menyajikan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tinggi dalam kerangka akuntansi”.

Menurut Sinaga dalam buku Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (2014:227) “standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam hal prinsip akuntansi”.

“Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan”. (Putriasri Pujanira, 2017)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Standar akuntansi menjadi referensi dalam penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah, agar dalam menyusun laporan keuangan pengguna dapat memahami informasi yang disajikan.

Menurut Bastian (2010:138) “tujuan standar akuntansi pemerintah (SAP) yaitu meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan melalui pengembangan standar akuntansi pemerintah (SAP)”.

“Tujuan standar akuntansi pemerintahan yaitu mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas”. (Diana Sari, 2013)

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan SAP adalah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

2.1.4 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah

Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah menjadi acuan dalam mengembangkan standar akuntansi. SAP terdiri atas kerangka konseptual dalam buku Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dan Adapun empat belas pernyataan, sebagai berikut:

1. Pernyataan No. 01 tentang penyajian laporan keuangan

Penyajian laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi tujuan bersama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penyajian laporan mencakup salah satu pedoman dan persyaratan isi laporan keuangan yang disusun dengan menerapkan basis akrual. Penyajian laporan keuangan menggunakan basis akrual yaitu dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun asset, kewajiban dan ekuitas.

2. Pernyataan No. 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas

Laporan realisasi anggaran berbasis untuk memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Tujuan realisasi anggaran adalah memberikan dasar-dasar penyajian realisasi anggaran untuk realisasi dan anggaran sebuah entitas pelaporan keuangan.

3. Pernyataan No. 03 tentang laporan arus kas

Laporan arus kas memberikan informasi yang disajikan untuk pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut mengenai histori pencatatan arus kas yang dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam satu periode akuntansi.

4. Pernyataan No. 04 tentang catatan atas laporan keuangan

Dengan adanya catatan atas laporan keuangan (CaLK) dapat membantu pengguna dalam memahami laporan keuangan.

5. Pernyataan No. 05 tentang akuntansi persediaan

Akuntansi persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan yang membantu kegiatan operasional pemerintah. Pernyataan ini tidak mengatur:

- a. Persediaan perlengkapan dan bahan baku yang dimiliki oleh proyek swakelola.
- b. Instrumen keuangan

6. Pernyataan No. 06 tentang akuntansi investasi

Akuntansi investasi tidak berlaku untuk perusahaan negara/pemerintah. Investasi dilakukan untuk memperoleh pendapatan/keuntungan dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat.

7. Pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap

Dalam penyajian neraca, aset tetap merupakan salah satu bagian utama aset pemerintah yang signifikan. Aset tetap juga termasuk dalam aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya yakni instansi pemerintah seperti universitas.

8. Pernyataan No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
Kontrak konstruksi umumnya memerlukan waktu yang panjang kurang lebih satu periode akuntansi. Konstruksi berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan dalam hal rancangan dan teknologi.
9. Pernyataan No. 09 tentang akuntansi kewajiban
Kewajiban timbul karena adanya adanya konsekuensi dan tanggung jawab yang timbul pada peristiwa masa lalu dalam konteks pemerintahan yang merupakan pendanaan utang. Setiap kewajiban dapat dipaksakan karena sudah terikat dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pernyataan No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
Kesalahan dalam membuat laporan keuangan sering timbul seiring berjalannya waktu laporan keuangan. Tujuan pernyataan ini yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi dalam koreksi kesalahan dan peristiwa yang luar biasa.
11. Pernyataan No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi
Laporan keuangan konsolidasi dibuat dalam rangka untuk menyajikan laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas dan keseimbangan laporan keuangan.
12. Pernyataan No. 12 tentang laporan operasional

Laporan operasional merupakan informasi keuangan yang memenuhi tujuan akuntabilitas pemerintah dimana dalam laporan operasional meliputi pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit entitas pelaporan keuangan.

13. Pernyataan No. 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum

Tujuan penyajian laporan keuangan badan layanan umum untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun badan layanan umum.

14. Pernyataan No. 14 tentang akuntansi aset tak berwujud.

Aset tak berwujud mencakup pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan.

Kerangka konseptual bisa disebut dengan sebuah siklus, dimana akuntansi sektor publik dirangkum melalui pembahasan yang membahas tentang perencanaan, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, realisasi anggaran serta pertanggungjawaban.

2.1.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. (Wikipedia, 2020).

Dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan/instansi tidak dibuat secara langsung, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan yang telah berlaku agar laporan keuangan mudah dipahami dan dimengerti.

Laporan keuangan merupakan hal penting dan sudah menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaan/instansinya pada suatu periode yang telah ditentukan.

Menurut Kasmir (2016: 7) dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah: laporan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Dalam laporan keuangan pada saat ini yaitu berkaitan kondisi terkini suatu perusahaan/instansi tersebut untuk mengetahui perkembangan perusahaan/instansi selama periode tertentu. Periode laporan keuangan, dibuat tiga bulan, atau enam bulan sehingga dengan adanya laporan keuangan, perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan terkini dengan menganalisis laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan salah satu sumber informasi serta dokumen penting yang digunakan oleh pengelolaan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berkaitan mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan memiliki peranan penting dalam mengetahui nilai suatu sumber daya ekonomi untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, mengevaluasi efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan dan mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sarwenda Biduri (2018: 96) mengatakan bahwa: "Hasil dari proses akuntansi yang penting dapat digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan yaitu dapat

mendefinisikan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen sebuah perusahaan dalam kondisi yang baik maupun sebaliknya”.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam buku Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, entitas pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya apa saja yang telah dilakukan serta hasil yang di capai dalam pelaksanaan yang terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Transparansi

Laporan keuangan yang disajikan harus secara terbuka dan jujur dalam memberikan informasi keuangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya kepada publik dalam hal pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam pengelolaan laporan keuangan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam laporan keuangan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, menyajikan dan melaporkan dalam mengungkapkan berbagai aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam hak dan kewenangan tersebut.

3. Manajemen

- a. Adanya perusahaan yang sehat seperti dalam perusahaan membagi tugas dengan jelas dan pertanggung jawaban yang dilakukan.
- b. Sistem yang memadai seperti uang, pencatatan akuntansi yang dilakukan dapat memberikan informasi mengenai realisasi anggaran.
- c. Mendukung perencanaan, dimana anggaran merupakan pengendalian yang sesuai apabila didukung dari berbagai pihak.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan salah satu tujuan dalam pembuatan laporan keuangan. Evaluasi kinerja dilakukan untuk perkembangan laporan keuangan secara bertahap.

5. Keseimbangan Antargenerasi

Dalam keseimbangan antargenerasi dapat membantu pengguna laporan keuangan mengenai pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah pada periode laporan yang diasumsikan apakah dapat menanggung beban pengeluaran tersebut

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2019, paragraph 18 mengatakan bahwa: "Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, agar komponen laporan yang disajikan terkait dengan jenis laporan dan elemen-elemen informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada waktu tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan disusun secara semaksimal mungkin sesuai kebutuhan perusahaan/instansi.

Tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan untuk memberikan informasi terutama yang bersifat keuangan pada pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan sebuah keputusan, terutama keputusan investasi dan kredit. (Rusmanto, 2006)

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2016: 10), sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan (CALK).
8. Informasi keuangan lainnya.

Jadi, dengan adanya informasi tentang berbagai tujuan pelaporan keuangan suatu perusahaan, maka dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh, transparan dan harus dimengerti dan dipahami tentang kinerja keuangan perusahaan saat ini.

2.1.6 PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diatur kedalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAK) No. 1 yang bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019: 42) mengatakan bahwa:

Pernyataan standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Laporan keuangan yang disajikan yaitu basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019: 34): “entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas”.

Menurut Kasmir (2016: 6), mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan secara khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan fungsi manajer keuangan, sebagai berikut: (1)merencanakan, (2)mencari, (3)memanfaatkan dana-dana perusahaan; dan (4)Memaksimalkan nilai perusahaan.

Dari keempat fungsi manajer keuangan diatas dapat diketahui bahwa seorang manajer harus merencanakan, mencari sumber dana dan membuat keputusan tentang sumber dana dan mampu menggunakan atau mengalokasikan dana secara tepat dan benar.

Menurut Halim & Kusufi dalam buku Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, mengatakan bahwa: “PSAP Nomor 01 berperan penting bagi penyusun laporan keuangan mengenai laporan keuangan apa saja yang seharusnya mereka buat, bagaimana formatnya serta bagaimana periode pelaporannya”.

2.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan adalah tindakan normative yang perlu dinyatakan dalam bentuk informasi akuntansi sehingga dapat sesuai dengan tujuan laporan keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2019:14).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan penggunaannya, sebagai berikut: (a) memiliki manfaat umpan balik, (b) memiliki manfaat prediktif, (c) tepat waktu, dan (d) lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (a) penyajian yang jujur, (b) dapat diverifikasi, dan (c) netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari

tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.8 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan terdiri dari laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran, sehingga adapun komponen laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) memberikan informasi terkait realisasi dan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur yang mencakup:

- a. Pendapatan – LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Pembiayaan

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pelaporan yang dinyatakan oleh asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Asset memberikan sumber daya yang cukup yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mencakup asset tetap, asset lancar dan asset lainnya. Kewajiban yaitu utang yang harus dibayar dimasa yang akan datang dari peristiwa masa lalu. Sedangkan ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah, dari asset dan kewajiban.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan – LO
- b. Beban
- c. Transfer
- d. Pos luar biasa

5. Laporan Arus Kas

Adapun unsur dari laporan arus kas yaitu pengeluaran kas dan penerimaan kas. Pengeluaran kas dan penerimaan seperti yang berkaitan dengan barang atau jasa dalam kejadian-kejadian distribusi dengan melakukan pengumpulan pembayaran.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/ Defisit – LO
- c. RK PPKD (rencana kerja pejabat pengelolaan keuangan daerah)
- d. Ekuitas Akhir

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang disajikan catatan atas laporan keuangan (CaLK), sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas ekuitas.
- b. Memberikan informasi kebijakan fiskal dan ekonomi makro
- c. Memberikan informasi pencapaian target keuangan selama satu tahun pelaporan serta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.
- d. Memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan untuk diterapkan.
- e. Memberikan informasi penjelasan dan rincian pos-pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Memberikan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Memberikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut yang disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan Arus Kas, hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai 2 fungsi perbendaharaan umum.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan.

Adapun perbedaan komponen laporan keuangan antara PP 24 Tahun 2005 dengan PP 71 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Perbedaan komponen laporan keuangan antara PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>Komponen Laporan Keuangan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) <p>Komponen Laporan Keuangan bersifat Optional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 	<p>Komponen Laporan Keuangan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Laporan b. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2. Laporan Finansial <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca b. Laporan Operasional (LO) c. Laporan Arus Kas (LAK) d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah yang berbeda dengan PP 24 Tahun 2005 (PP No. 71 Tahun 2010): (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) laporan Perubahan Ekuitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki berbagai pendapat yang mengangkat tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Amelia Tirta Yuningsih (2018) Evaluasi Penerapan PP NO. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan interpretatif dikarenakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan instansi pemerintah menuju penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban dalam laporan keuangan di Poltekkes Makassar menggunakan sistem akrual basis dimana kewajiban diakui pada saat dana pinjaman atau anggaran diterima.
2. Sinta Putri Utami (2019) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mempelajari sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa RSUD Wonosari belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan tahun 2018 karena ada beberapa kendala yang dialami sehingga belum diterapkan PSAP tersebut.
3. M. Och Fajar Arif Trianto (2018) Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan SAP harus mengikuti persyaratan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2.3 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintahan yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng yang berlokasi di Jalan Salotungo Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan 90812. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk rangkaian kata-kata untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data dan memilih inti-inti yang terpenting dan membuat sebuah kesimpulan.

3.2.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu berupa laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng tahun buku 2020. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan pegawai instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sub bagian

keuangan sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipercaya sesuai kebenarannya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng seperti gambaran umum instansi, visi dan misi, sejarah singkat instansi dan lain-lain.

Sumber data yang diperoleh tidak hanya mengumpulkan data tetapi harus menganalisis setiap data yang berasal dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti agar informasi yang diperoleh mendukung hasil penelitian peneliti.

Untuk memperoleh data tersebut, maka peneliti membutuhkan teknik dalam pengumpulan data tersebut. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan untuk melakukan sebuah penelitian, dimana pengumpulan data tidak hanya sekedar mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen tetapi harus menganalisisnya kedalam teori-teori agar data tersebut mudah di pahami.

3.3 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam melakukan sebuah penelitian, karena mempunyai tujuan utama yaitu untuk mendapatkan sebuah data untuk hasil penelitian yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2015:225), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yang bekerja berdasarkan sebuah data tentang fakta yang mengenai dunia nyata.

Metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau

yang digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada instansi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sehingga data yang diperoleh mendekati kebenaran dan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lingkungan instansi..

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pegawai pada Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan seputar penyajian laporan keuangan sehingga peneliti dapat mengetahui secara pasti informasi yang lebih akurat dari hasil wawancara dan menggabungkannya dengan hasil observasi agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi.

3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari metode observasi dan wawancara akan lebih kuat dan dapat dipercaya apabila adanya dokumen-dokumen sebagai pelengkap baik berbentuk gambar maupun tulisan. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini seperti laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan dokumen-dokumen lain sebagai pendukung dari bagian penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

3.4 Metode analisis

Menurut Sugiyono (2019: 319) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi, dengan cara menggabungkan data kedalam sebuah kategori lalu menjabarkannya ke dalam unit-unit, dan membuat kesimpulan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif-komparatif. Metode analisis komparatif dalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan membandingkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tahapan analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
2. Mengumpulkan informasi seperti data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari para informan dan mengelolanya sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
4. Menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk uraian lalu membuat kesimpulan dari data tersebut sehingga mudah dipahami.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pernyataan yang memuat batasan tentang pengertian dari teori-teori atau variable-variabel operasional yang diperlukan sebagai tolak ukur yang digunakan dalam penelitian tersebut.

1. Standar akuntansi pemerintah menjadi referensi dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dalam

menyusun sebuah laporan keuangan pengguna dapat mengetahui informasi yang disajikan dengan baik dan jelas.

2. Laporan keuangan adalah sumber informasi penting yang digunakan oleh pengelolaan keuangan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi.
3. Penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAK Nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun variable penyajian laporan keuangan dapat diukur dengan:
 - a. Laporan keuangan disediakan dengan basis akrual
 - b. Informasi yang didapatkan berguna dalam pengambilan sebuah keputusan.
 - c. Penyajian laporan keuangan disajikan secara lengkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimaksudkan dapat menyediakan informasi bagi pengguna mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi yang telah dilakukan selama satu periode akuntansi. Penyusunan laporan keuangan sangat penting dilakukan oleh instansi maupun perusahaan karena merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam memaparkan hasil yang dicapai selama satu periode akuntansi tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Soppeng, merupakan instansi pemerintahan yang bertanggung jawab terkait semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Soppeng. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas yaitu melakukan pelaksanaan pada urusan pemerintahan Kabupaten Soppeng pada bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas yang diberikan, serta melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas masing-masing bidang.

Dengan adanya Instansi dinas pendidikan, pemerintah daerah pada bidang pendidikan melaksanakan tugas pada wilayah/kabupaten kerja, tugas yang terdiri dari dibantukan dalam urusan pendudukan, penyusunan strategi, perumusan kebijakan Pendidikan, menyusun program pendidikan, pengawasan, hingga menyediakan pelayanan konteks edukasi. Dinas Pendidikan melakukan wewenang dalam pembinaan dan meberikan izin kepada sekolah dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA)

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Soppeng berlokasi di Jalan Salotungo, Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, 90812, yang berada kurang lebih 3 kilometer sebelah timur Kota Kabupaten Soppeng.

4.1.1 Sejarah Singkat Instansi

Dinas pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian dalam pemerintahan di Indonesia yang mengkoordinasikan urusan pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Masyarakat dan Pengelolaan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada dalam tanggung jawab kepada presiden yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945.

Pada tahun 1988, Indonesia mengalami kendala dalam bidang politik serta ekonomi. Sebelum diberlakukannya UU No.25 dan UU No.32 tahun 2001 tentang otonomi daerah pengolahan pendidikan di tingkat kabupaten di tangani oleh 2 lembaga. Yakni kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng di singkat Kandep Dikbud dan Dinas Pendidikan. Kandep Dikbud sifatnya vertikal dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan Dinas Pendidikan di bawahi oleh Departemen dalam negeri. Dinas Pendidikan Kabupaten hanya menangani tenaga Pendidikan dan tenaga Kependidikan untuk sekolah Dasar dan TK, sedangkan Kandep Dikbud Kabupaten menangani teknis dan manajemen Pendidikan tingkat Kabupaten adapun urusan Kepegawaian mulai SLTP dan SLTA langsung di kantor wilayah provinsi untuk tingkat kecamatan di kelola oleh Kancam Dikbud.

Setelah UU otonomi daerah tahun 2001 berlaku, maka ke dua lembaga tersebut di gabung dengan nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Untuk tingkat Kecamatan berubah menjadi UPTD Dinas Pendidikan sedangkan urusan Kebudayaan di pertanggungjawabkan kepada Dinas Pariwisata.

Pada tahun 2018 nama kelembagaan di ubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng yang di tetapkan dalam peraturan Bupati Soppeng Nomor

45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2019 nama instansi kembali di ubah menjadi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng yang di tetapkan pada peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2019.

4.1.2 Visi dan Misi Instansi

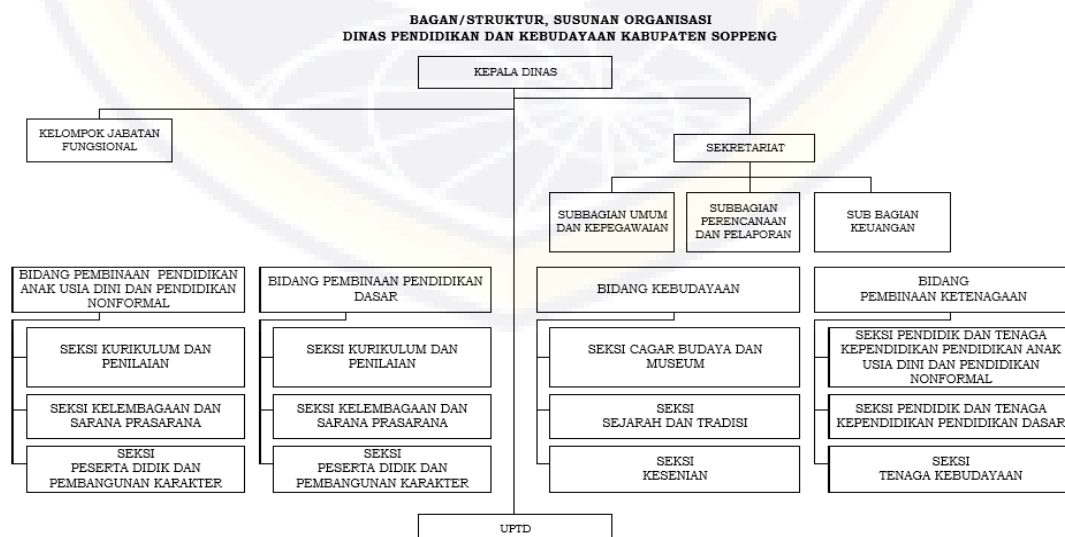
Visi : ***“Merata Dalam Mutu, Berdaya Saing Yang Dilandasi Iman Dan Taqwa, Berbudaya”***.

Misi :

1. Mewujudkan aksesibilitas edukasi keseluruhan masyarakat, mudah dijangkau, tidak mendiskriminasi, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
2. Mewujudkan nilai dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4.1.4 Uraian Tugas

Adapun uraian tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Soppeng yaitu:

1. Kepala Dinas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam membantu Bupati untuk memimpin dan menyelenggarakan pada permasalahan kependidikan dan kebudayaan pada Kabupaten Soppeng berdasarkan dengan kewenangan dan ketetapan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng memiliki tanggungjawab dalam bertugas yaitu membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang ada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Sekretaris menaungi tiga subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas yaitu untuk membantu sekretariat dalam melakukan pengelolaan kepegawaian dan mengelola serta melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris dalam urusan perencanaan dan melaporkan dan

mengelola administrasi perencanaan berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan bertugas untuk membantu sekretariat dalam melakukan pelaporan keuangan yang terkait dengan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi sebuah data.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Pada bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal terdiri dari tiga bagian yaitu: (1) seksi kurikulum dan penilaian, (2) seksi kelembagaan dan sarana prasarana, (3) seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas terkait dengan pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal.

4. Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dasar

Pada bidang pembinaan dan pendidikan dasar terdiri dari tiga bagian yaitu: (1) seksi kurikulum dan penilaian, (2) seksi kelembagaan dan sarana prasarana, (3) seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Bidang pembinaan dan pendidikan dasar dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas terkait dengan pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Kebudayaan

Pada bidang kebudayaan terdiri dari tiga bagian yaitu: (1) seksi cagar budaya dan museum, (2) seksi sejarah dan tradisi, (3) seksi kesenian. Bidang kebudayaan dipimpin oleh kepala bidang dalam membantu Kepala

Dinas mengenai urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang kebudayaan.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pada bagian pembinaan dan ketenagaan dapat dibagi menjadi tiga poin yaitu: (1) seksi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal, (2) seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, (3) seksi tenaga kebudayaan. Bidang pembinaan ketenagaan dipimpin oleh kepala bidang dalam membantu Kepala Dinas mengenai urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembinaan PTK PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Penjelasan Gambaran Umum Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng

Dalam pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng untuk penerapan perlakuan akuntansi Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang mencakup transaksi pendapatan dan belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI bagi Pemerintah Daerah. Adapun sistem prosedur Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/Perbup/XI/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pertama kali diterapkan. Diterapkannya PP 71 Tahun 2010 secara bertahap hingga bisa diterapkan sepenuhnya oleh instansi pemerintahan.

Pada laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari tujuh komponen laporan keuangan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng hanya menyajikan lima komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan pernyataan dari pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, Ibu Nuryani pada tanggal 26 Februari 2021:

“iya betul, komponen laporan keuangan sudah sesuai dengan PP 71 tersebut. Komponen pelaporan keuangan yang disediakan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran atau LRA, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Karena itu komponen yang mengacu pada SAP”.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng tidak menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Subbagian Keuangan, Ibu Hasnah pada tanggal 26 Februari 2021:

“iya nak, kita disini hanya menyajikan lima komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2010. Untuk Saldo Anggaran Lebih dengan Laporan Arus Kas bukan kita yang urus, itu tanggungjawab dari kabupaten atau bendahara umum daerah, karena kita disini hanya membuat LRA, neraca, LO, LPE dan CaLK”.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelolaan keuangan. Seperti yang dikatakan Ibu Nuryani pada tanggal 26 Februari 2021:

“untuk kendalnya pasti pernah dialami dek seperti kurangnya bimtek, terbatasnya juga pengelolaan keuangan semacam sdm kurang, skill juga. seperti saya, saya kan bukan berasal dari jurusan akuntansi tapi ditempatkan dibidang akuntansi, tapi Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya bisa lakukan semua ini sendiri dan bisa tepat waktu dalam pengerjaan”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala subbagian keuangan, Ibu Hasnah pada tanggal 26 Februari 2021:

“pegawai subbagian keuanagn memang ada beberapa, semua pegawai terlibat dalam pengelolaan keuangan tapi beda-beda tugasnya, ada yang verifikasi setiap sekolah, ada yang memeriksa karena harus diteliti satu-satu apalagi kalau anggaran sekolah. selama ini untuk penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh Ibu Yani, tapi sekarang Ibu Yani juga sudah dibantu oleh pegawai yang baru terangkat jadi PNS”.

Dasar akuntansi yang menjadi fondasi bagi pelaporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menggunakan basis akrual dan basis kas. Basis akrual digunakan dalam neraca dan Laporan Operasional (LO), dimana basis akuntansi ini mengakui dampak sebuah transaksi dan peristiwa lain ketika hal tersebut terjadi dan tidak melihat saat kas atau sama dalam hal kuantiti kas yang didapatkan atau didanai. Sedangkan basis kas yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana akuntansi membenarkan adanya dampak dari proses jual beli serta faktor-faktor lain pada saat kas atau hal yang memiliki nilai jual sama dengan kas didapatkan ataupun dilunasi.

Fondasi akrual yang diberlakukan pada pelaporan keuangan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dan basis kas untuk pendapatan LRA dan belanja.

Laporan Operasional yang memberlakukan dasar akrual dapat diartikan sebagai pendapat yang dibenarkan adanya Ketika hak untuk memperoleh pemasukan telah dipenuhi, walaupun kas masih berada dalam kondisi belum terpenuhi pada kas daerah dan beban-pun telah terakui disaat kewajiban mengalami penurunan nilai kekayaan bersih yang sebelumnya telah dipenuhi meskipun kas tersebut masih berada pada kas daerah.

Dalam perihal anggaran dilaksanakan dan disusun menurut basis kas, dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dibuat berdasarkan basis kas yang dapat diartikan sebagai penerimaan pembiayaan serta pendapatan telah diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah beserta belanja, tranfer dan pengeluaran pembiayaan yang diakui pada saat kas tersebut masih tersimpan pada kas daerah.

Basis akrual untuk neraca yang mencakup kekayaan, hal yang wajib dilaksanakan, serta ekuitas dibenarkan adanya dan didata Ketika proses transaksi yang berpengaruh pada laporan keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas tersebut diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Dari hasil penelitian di atas dikemukakan bahwa Pengadaan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng telah mengikuti ketentuan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karena memang benar adanya telah berada dalam kondisi sesuai jika berpatokan pada item-item yang diterapkan pada laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan, untuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas tidak dimasukkan kedalam item-item laporan keuangan tersebut karena untuk saldo

dana telah disajikan dengan modul yang lebih maksimal dari pihak pengelola bagian keuangan, begitupula dengan laporan arus kas semua aliran kas yang memasuki instansi dan semua aliran kas yang keluar disajikan oleh pengelola keuangan daerah.

4.2.2 Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit. Laporan realisasi anggaran yang diberlakukan berbasis Kas dalam pengakuan semua proses pertukaran materi pada waktu terjadinya proses pemasukan dan keluarnya dana kas.

Adapun struktur LRA diuraikan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp1.016.000.00. Sedangkan, realisasi belanja Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 ialah sebesar Rp366.490.912.560.07 yang terdiri dari:

- a. Belanja operasi sebesar Rp307.795.787.828.00
- b. Belanja modal sebesar Rp50.073.762.353.00

Surplus/defisit Tahun 2020 merupakan fakta yang membandingkan antara diwujudkannya pendapatan daerah yang dikurangkan dengan Realisasi Belanja, dengan rincian yang terdiri dari:

- a. Jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.016.000.00
- b. Jumlah realisasi belanja daerah sebesar Rp357.869.550.181.00
- c. Surplus/Defisit sebesar (Rp357.869.550.181.00)

Dalam hal ini, pencatatan anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

dibuat dengan mendasari data pendapatan dan juga pembiayaan yang telah dibenarkan pada saat kas diterima Rekening Kas Umum baik Negara maupun Daerah. Realisasi pendapatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng sebesar Rp1.016.000.00 yang berasal berasal dari retribusi. Sedangkan belanja merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara umum daerah untuk pembelanjaan dimana jumlah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp366.490.912.560.07 dan terealisasi sebesar Rp357.869.550.181.00 atau mencapai 97.65% yang berasal dari Belanja Operasi (pengeluaran yang berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, dan pengeluaran dana dalam hal barang dan jasa), Belanja Modal (belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal dana bos).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang mencakup item-item pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng hanya menyediakan pendapatan dan belanja dimana pendapatan dan belanjaja tersebut menggunakan basis kas.

Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setelah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng disusun menggunakan basis kas yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah berserta

belanja, tranfer dan pengeluaran pembiayaan yang diakui pada saat kas tersebut dikeluarkan dari kas daerah.

2. Neraca

Neraca memiliki peran untuk memberi gambaran akan posisi laporan keuangan yang dapat diuraikan menjadi beberapa poin, yakni posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca merupakan kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas melalui laporan keuangan.

Neraca yang disajikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan gambaran posisi keuangan per 31 Desember 2020, dimana hal tersebut dibagi lagi menjadi beberapa poin, terdiri dari aset dengan total jumlah Rp361.546.583.589.12, kewajiban sebesar Rp83.067.406.00.

a. Jumlah aset sebesar Rp361.546.583.589.12 yang terdiri dari:

- 1) Aset lancar sebesar Rp3.731.529.453.40
- 2) Aset tetap sebesar Rp355.188.884.127.86
- 3) Aset lainnya sebesar Rp2.626.173.007.86

b. Jumlah kewajiban sebesar Rp83.067.406.00

c. Ekuitas sebesar Rp361.463.519.183.12

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam hal ini laporan keuangan yang menyajikan laporan keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas meliputi:

a. Aset

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, aset didefinisikan sebagai satu dari sekian banyak sumber daya ekonomi yang

tergolong sebagai hal miliki. Oleh karena itu, aset diharapkan dapat berupa satuan uang yang dikategorikan dalam sumber daya yang bersifat non-finansial dan berbagai sumber daya lainnya yang berada dalam naungan sebab adanya kontribusi bernilai sejarah dan budaya.

Jumlah aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppengper 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp361.546.586.589.12 dan Rp332.184.936.132.06 atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.361.650.457.06. Adapun nilai masing-masing aset-aset yang dimaksud dapat dilihat lebih detil pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Rincian Aset

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Aset Lancar	Rp 3.731.529.453.40	Rp 3.704.909.210.06
Aset Tetap	Rp 355.188.884.127.86	Rp 325.726.598.695.82
Aset Lainnya	Rp 2.626.173.007.86	Rp 2.753.428.226.18
Jumlah	Rp 361.546.586.589.12	Rp 332.184.936.132.06

(Sumber: LRA Permendagri No.64 Tahun 2013 Tahun Anggaran 2020)

Dari tabel diatas, diuraikan dalam akun-akun dibawah ini:

1) Aset Lancar

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset lancar diklarifikasi dengan berpatokan pada tingkat likuiditasnya karena diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu dibawah 12 bulan setelah tanggal neraca.

Aset lancar per 31 Desember 2020 dengan nominal rupiah sebesar Rp 3.731.529.453.40 dan tahun 2019 sebesar Rp3.704.909.210.06 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 26.620.243.34. Aset lancar mencakup kas dan setara kas, penginvestasian yang dilakukan dalam kurun waktu

singkat, piutang, dan ketersediaan materi. Aset lancar telah dijabarkan pada tabel 4.2 seperti yang telah diuraikan dibawah ini:

Tabel 4.2
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Kas dan Setara Kas	Rp 3.711.601.845.40	Rp 3.704.909.210.06
Piutang Pendapatan	Rp 0.00	Rp 19.345.567.00
Penyisihan Piutang	Rp 0.00	Rp (96.727.84)
Beban Dibayar Dimuka	Rp 6.663.708.00	Rp 5.182.707.50
Persediaan	Rp 13.263.900.00	Rp 11.504.950.00
Jumlah	Rp 3.731.529.453.40	Rp 3.704.909.210.06

(Sumber: LRA Permendagri No.64 Tahun 2013 Tahun Anggaran 2020)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa:

Kas serta segala hal yang bisa dikatakan memiliki nilai yang sama berasal dari kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya, dan dana BOS. Kas dan Setara Kas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.771.601.845.40 dan Tahun 2019 sebesar Rp3.668.972.713.40 atau mengalami kenaikan Rp42.629.132.00.

Piutang pendapatan bersumber dari piutang sah lainnya yang bersumber pada piutang pengembalian dana bos. Piutang pendapatan per 31 Desember 2020 dengan nilai Rp0.00 dan Tahun 2019 Rp19.345.567.00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp19.345.567.00).

Penyisihan piutang bersumber dari piutang lainnya. Penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.00 dan Tahun 2019 sebesar (Rp96.727.84).

Beban dilunasi didepan per 31 Desember 2020 dengan nilai Rp6.663.708.00 kemudian pada Tahun 2019 sebesar Rp5.182.707.50 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.481.000.00. Beban dibayar dimuka telah diakui beban pada Laporan Operasional.

Saldo persediaan didukung dalam sebuah kegiatan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mempunyai sifat yang habis pakai dan diperoleh yang dijelaskan untuk dijual/diserahkan kepada publik/masyarakat. Rincian persediaan didapatkan dari persediaan bahan pakai yang telah dipergunakan hingga tak tersisa serta ketersediaan barang lainnya. Persediaan bahan habis pakai tersebut mencakup persediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.263.900.00 dan Tahun 2019 sebesar Rp11.504.950.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.758.950.00.

2) Aset Tetap

Berbicara mengenai Aset tetap, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2020 telah terdata memiliki nilai sebesar Rp355.188.884.127.86 dan Tahun 2019 sebesar Rp325.726.598.695.82 atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.462.285.432.04 yang merupakan nilai netto tetap setelah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp159.137.792.094.58).

Adapun rincian aset tetap per 31 desember 2020 diuraikan antara lain:

Tabel 4.3
Rincian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
--------	------------	------------

Tanah	Rp 83.673.431.016.24	Rp 83.668.676.216.24
Peralatan dan Mesin	Rp 73.015.974.111.97	Rp 48.535.444.504.97
Gedung dan Bangunan	Rp 349.127.864.011.58	Rp 325.004.083.633.58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 526.526.110.00	Rp 496.949.610.00
Aset Tetap Lainnya	Rp 7.982.880.972.65	Rp 7.946.668.772.65
Konstruksi dan Pengerjaan	Rp 0.00	Rp 0.00
Akumulasi Penyusutan	(Rp159.137.792.094.58)	(Rp139.925.224.041.62)
Jumlah	Rp 355.188.884.127.86	Rp 325.726.598.695.82

(Sumber: LRA Permendagri No.64 Tahun 2013 Tahun Anggaran 2020)

Selama tahun 2020 aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mengalami mutasi karena adanya penambahan, pengurangan, dan penyusutan dalam aset tetap.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa:

- a) Tanah pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp-83.188.884.127.86 dan 2019 sebesar Rp83.668.676.216.24 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.754.800.00 dengan rincian tanah yang terdiri dari tanah yang dipergunakan dalam pembuatan gedung serta tanah yang diberdayakan bukan untuk pembuatan bangunan.
- b) Alat-alat beserta perlengkapan mekanik pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp73.015.974.111.97 dan 2019 sebesar Rp48.535.444.504.97 atau mengalami kenaikan sebesar Rp24.480.529.607.00 yang terdiri dari beberapa rincian diantaranya adalah peralatan support atau bantu, angkutan darat bertenaga motoric maupun yang tidak, alat mekanisasi bengkel manual, alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, alat yang dibergunakan dalam hal pengolahan, berbagai macam utility yang diberdayakan untuk menjaga kesuburan tanaman atau alat

maintenance, peralatan yang digunakan pada gedung perkantoran, alat domestic yang biasa ditemui pada keseharain rumah tangga, computer, furniture-furnitur seperti meja dan juga kursi para pejabat, alat studio, alat yang menyokong dan dan mengadakan sistem komunikasi, alat pemancar, alat yang berkontribusi dalam bidang kedokteran, alat kesehatan, beberapa peralatan yang dikhususkan pada labolatorium, dan yang terakhir ialah segala macam equipment yang dipergunakan dalam pelaksanaan praktik beserta alat-alat peraga.

- c) Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp349.127.864.011.58 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp325.004.083.633.58 atau mengalami kenaikan sebesar Rp24.123.780.378.00. Gedung dan bangunan terdiri dari bangunan Gedung tempat kerja, bangunan Gedung tempat tinggal, bangunan bersejarah, monument/bangunan bersejarah.
- d) Jalan berupa aspal, sistem irigasi serta Jaringan internal maupun eksternal yang berada dalam kuasa Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp526.526.110.00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp496.949.610.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.576.500.00 dengan rincian yaitu bangunan air irigasi, bangunan yang memiliki peran dalam berkembangnya water source Bersama dengan ketersediaan air tanah, instansi yang menyediakan konsumsi air minum yang sesuai dengan standar

Kesehatan yang berlaku, distribusi jaringan tenaga listrik, dan network koneksi telepon.

- e) Aset tetap lain yang termasuk dalam hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.982.880.972.65 dan 2019 sebesar Rp7.946.668.772.65 atau mengalami kenaikan sebesar Rp36.212.200.00 dengan rincian yaitu buku, barang bercorak kebudayaan, barang-barang perpustakaan, alat olahraga lainnya, aset tetap renovasi.
- f) Konstruksi dan pengerjaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.00 dan 2019 sebesar Rp0.00.
- g) Akumulasi penyusutan merupakan aset tetap yang pada suatu waktu dapat mengalami perubahan kedudukan semisal menyusut pada periode kapasitas yang telah memiliki kesangkutpautan. Jika daya tampung sebuah aset pada hakekatnya akan terus dan terus mengalami penurunan yang disebabkan oleh dipergunakannya hal tersebut dalam biaya operasional Pemerintahan, dikarenakan hal tersebut.. aset tetap yang dimaksud tentu saja jumlahnya akan turun. per 31 Desember 2020 sebesar (Rp159.137.792.094.58) dan 2019 sebesar (Rp139.925.224.041.62). Adapun rincian akumulasi penyusutan dijabarkan seperti yang telah tertera pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp49.346.769.296.16)	(Rp40.436.238.455.31)
Akumulasi Penyusutan	(Rp106.870.387.584.84)	(Rp96.889.381.239.87)

Gedung dan Bangunan		
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(Rp149.760.040.48)	(Rp133.901.765.84)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(Rp2.770.875.173.10)	(Rp2.465.702.580.60)
Jumlah	(Rp159.137.792.094.58)	(Rp139.925.224.041.62)

(Sumber: LRA Permendagri No.64 Tahun 2013 Tahun Anggaran 2020)

3) Aset Lainnya

Aset lainnya, secara harfiah tidak memiliki karakteristik untuk dapat digolongkan dan dilabeli sebagai aset tetap. Aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.626.173.007.86 dan 2019 sebesar Rp2.753.428.226.18 atau mengalami penurunan sebesar (Rp127.255.218.32).

Tabel 4.5
Rincian Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Aset Tidak Berwujud	Rp 0.00	Rp 10.800.000.00
Aset Lain-Lain	Rp 10.003.758.811.19	Rp 10.003.758.811.19
Akumulasi Penyusutan Aset Lain	(Rp 7.377.585.803.33)	(Rp 7.261.130.585.01)
Jumlah	Rp 2.626.173.007.86	Rp 2.753.428.226.18

(Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2020).

Aset tak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.00 dan 2019 dengan jumlah nominal Rp10.800.000.00. Aset tak berwujud secara dinilai dari perolehannya yaitu software dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud lainnya. Untuk perhitungan amortisasi yang menyajikan nilai nette aset, perhitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus yang amortisasinya diperhitungkan sebagai beban.

Aset lain-lain merupakan aset yang telah dihentikan penggunaannya secara permanen/total pada kegiatan normal entitas karena rusak berat.

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.003.758.811.19 dan 2019 sebesar Rp10.003.758.811.19.

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp7.377.585.803.33) dan 2019 sebesar (Rp7.261.130.585.01).

b. Kewajiban

Kewajiban mempunyai dampak transaksi pada masa lalu sehingga timbul konsekuensi atau tanggungjawab yang menyebabkan Pemerintah Daerah harus membayar dan pelunasannya dapat berujung pada aliran output sumber daya yang memiliki nilai ekonomis pada Pemerintah Daerah. Yang merupakan suatu hal wajib diperoleh berasal dari kewajiban dalam kurun waktu yang cukup singkat serta yang lama.

Adapun berbagai macam kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 83.067.406.00 dan 2019 sebesar Rp 48.219.552.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 34.847.854.00.

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih dari selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Total ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp361.463.519.183.12 dan 2019 sebesar Rp332.136.716.580.06 atau mengalami kenaikan Rp29.326.802.603.06.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setelah dibandingkan dengan laporan keuangan yang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng maka Neraca sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71, yang terdiri aset, kewajiban dan ekuitas. Yang mana aset lancar terdiri dari kas&setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap

terdiri dari tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, tetapi pada aset tetap terdapat penambahan yaitu akumulasi penyusutan karena aset tetap disusutkan selama kapasitas tersebut semakin menurun karena adanya kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka aset tetap tersebutpun menurun.

3. Laporan Operasional (LO)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pada Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos yaitu pendapatan-LO dari kegiatan operasi, beban dari kegiatan operasi, surplus defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), surplus/defisit-LO, penambahan pos-pos.

Akun-akun Laporan Operasional yang disajikan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp 1.097.795.000.00 dan Tahun 2019 sebesar Rp 893.408.120.00
- b. Baban per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp 326.896.460.923.22 dan Tahun 2019 sebesar Rp 338.867.779.085.14
- c. Surplus/Defisit per 31 Desember Tahun 2020 sebesar (Rp325.798.665.923.22) dan Tahun 2019 sebesar (Rp337.974.370.965.14)

Adapun penjelasan dari akun-akun Laporan Operasional (LO) yang disajikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.097.795.000.00 dan Tahun 2019 sebesar Rp893.408.120.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 204.386.880.00.

Pendapatan bersumber dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 1.016.000.00 dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LO sebesar Rp 1.096.779.000.00.

Pendapatan tahun 2020 disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rincian Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.016.000.00	Rp 16.295.000.00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp 1.096.779.000.00	Rp 877.113.120.00
Jumlah	Rp 1.097.795.000.00	Rp 893.408.120.00

(Sumber: Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2020).

Berikut masing-masing uraian akun pendapatan:

Tabel 4.7
Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.016.000.00	Rp 2.476.000.00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 0.00	Rp 13.819.000.00
Jumlah	Rp 1.016.000.00	Rp 16.295.000.00

(Sumber: Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2020)

Tabel 4.8
Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Rp 1.096.779.000.00	Rp 877.113.120.00
Jumlah	Rp 1.096.779.000.00	Rp 877.113.120.00

(Sumber: Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2020)

b. Beban

Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp326.896.460.923.22 dan 2019 sebesar Rp338.867.779.085.14 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 11.971.318.161.91). Beban Tahun 2020 bersumber dari:

Tabel 4.9
Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Beban Pegawai	Rp 269.772.307.643.00	Rp 289.178.075.327.00
Beban persediaan	Rp 10.306.219.927.00	Rp 10.650.623.188.00
Beban Jasa	Rp 9.519.276.519.00	Rp 5.768.282.616.00
Beban Pemeliharaan	Rp 1.851.298.855.50	Rp 1.684.842.856.33
Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.151.811.200.00	Rp 1.873.752.450.00
Beban Hibah	Rp 9.859.225.000.00	Rp 9.233.000.000.00
Beban Penyusutan	Rp 18.803.223.567.72	Rp 13.944.641.562.97
Beban Lain-Lain	Rp 5.633.098.211.00	Rp 6.534.464.357.00
Jumlah	Rp 326.896.460.923.22	Rp 338.867.779.085.14

(Sumber: Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2020).

c. Surplus/defisit LO

Tahun 2020 sebesar (Rp325.798.665.923.22) dan 2019 sebesar (Rp337.974.370.965.14). Surplus defisit merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dan Beban Operasional Tahun 2020.

d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Tahun 2020 sebesar (Rp326.441.467.484.47) dan 2019 sebesar (Rp338.224.535.564.30).

Surplus defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari defisit dari kegiatan non operasional lainnya, yang mana defisit dari kegiatan non operasional lainnya merupakan nilai buku.

Dilihat dari penjelasan diatas, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Laporan Operasional sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mana laporan operasional disusun dengan menggunakan basis akrual yaitu seluruh transaksi ekonomi diakui pada saat

terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan. Pada Laporan Operasional tidak ada penambahan pos-pos yang menyajikan hasil operasi suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos yaitu ekuitas awal, surplus/defisit, koreksi, dan ekuitas akhir.

a. Ekuitas awal

Ekuitas awal menggambarkan ekuitas Neraca Audit Per 31 Desember 2019 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2020. Jumlah ekuitas awal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar Rp332.136.716.580.06.

b. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Per 31 Desember 2020 sebesar (Rp326.441.467.484.47).

c. Rk Ppkd

Rk Ppkd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Per 31 Desember 2020 sebesar Rp329.564.543.363.00.

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar memiliki pengaruh pada akun ekuitas akibat transaksi dimasa lalu. Dampak kumulatif tersebut terdiri:

- 1) Kenaikan/penurunan nilai kas sebesar Rp28.317.232.261.00
- 2) Kenaikan/penurunan nilai aset tetap akibat koreksi sebesar Rp0.00

- 3) Kenaikan/penurunan nilai aset tetap akibat mutasi sebesar (Rp1.259.264.200.00)
- 4) Kenaikan/penurunan nilai aset tetap akibat perubahan kelembagaan sebesar 0.00
- 5) Kenaikan/penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat koreksi sebesar (Rp1.787.616.840.16)\
- 6) Kenaikan/penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat mutasi sebesar Rp933.278.775.85
- 7) Kenaikan/penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat perubahan sebesar 0.00
- 8) Kenaikan/penurunan nilai utang belanja akibat koreksi sebesar Rp0.00
- 9) Kenaikan/penurunan nilai penyisihan piutang lainnya sebesar Rp96.727.84

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2020 sebesar Rp361.463.519.183.12 merupakan ekuitas awal sebesar Rp332.136.716.580.06, surplus/defisit Lo sebesar (Rp326.441.467.484.47), Rk Ppkd sebesar Rp329.564.543.363.00 dan kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp26.203.726.724.53.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan dalam bentuk penjelasan terkait rincian komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan, dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat memberikan informasi tentang pencapaian target keuangan selama satu tahun pelaporan pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Catatan atas Pelaporan Keuangan (CaLK) terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

- 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

Keuangan Pendapatan Belanja Daerah

- 1) Ekonomi Makro
- 2) Kebijakan Keuangan
- 3) Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1) Visi dan Misi Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Mencapai Target yang Telah ditetapkan
- 3) Prosedur yang Telah Dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 1) Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD
- 5) Pengukuran Dan Pengakuan Transaksi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
 - a. Pengakuan Belanja Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- b. Pengakuan Belanja Laporan Operasional (LO)
- c. Pengakuan Piutang
- d. Pengakuan Persediaan
- e. Pengakuan Aset Tetap
- f. Depresiasi Aset Tetap
- g. Pengakuan Aset Tidak Berwujud
- h. Amortisasi Aset Tak Berwujud
- i. Pengakuan Kewajiban
- j. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasi

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Belanja
 - b. Pendapatan
- 2) Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
- 3) Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan
 - b. Beban
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - a. Ekuitas Awal
 - b. Surplus/Defisit – LO
 - c. Rk Ppkd
 - d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

e. Ekuitas Akhir

4.2.1 Pembahasan

Proses pengelolaan yang diterapkan untuk bagian keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mengacu pada perlakuan akuntansi yang mencakup transaksi pendapatan dan belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menurut PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan menggunakan basis akrual. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menggunakan diidentifikasi telah menerapkan dua buah basis dalam hal akuntansi, yang pertama ialah basis akrual kemudian yang kedua adalah basis kas. Dimana basis akrual dibagi lagi menjadi dua macam, yakni pada neraca dan Laporan Operasional (LO), yang mana basis akuntansi ini telah memberi pengakuan bahwa adanya pengaruh sebuah proses pertukaran berupa transaksi dan peristiwa pada saat itu terjadi tanpa melihat saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan pada untuk pengukuran/pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk basis kas yang digunakan yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana pengukuran/pengakuan yang merujuk pada jumlah pemasukan atau pendapatan LRA dan belanja, basis kas tersebut mengakui pengaruh sebuah transaksi dan peristiwa lain pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dan untuk pengukuran.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyajikan tujuh komponen laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan lajur aliran Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan

atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng tidak menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas karena untuk saldo dana atau anggaran dapat disajikan dengan lebih maksimal oleh pihak yang memegang kuasa penuh pada bidang pendaan, yakni bendahara umum daerah/kabupaten, sama halnya dengan laporan yang membahas dan menerangkan perihal arus kas yang terhitung masuk kedalam instansi bersama dengan seluruh pengeluaran dana yang keluar dari kas, pada akhirnya akan disajikan oleh bendahara umum daerah/kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang mencakup item-item pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan pos luar biasa. Sementara yang dapat dilihat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng hanya menyediakan pendapatan dan belanja dimana pendapatan dan belanja tersebut menggunakan basis kas. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa setelah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng disusun menggunakan basis kas yang dapat diartikan sebagai arus pendapatan dan juga segala macam penerimaan pemdanaan yang telah diakui dan dibenarkan tepat pada saat dan waktu kas diterima oleh penanggung jawab kas daerah berserta belanja, transfer dan output yang mengalir dari bagian pendanaan yang diakui pada saat kas tersebut dikeluarkan dari kas daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor Tahun 2010, komponen laporan keuangan yaitu neraca sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Pada rincian aset terdapat rincian aset tetap, yang mana pada aset tetap tersebut terdapat penambahan uraian aset tetap yaitu akumulasi penyusutan karena aset tetap yang disusutkan selama kapasitas tersebut

Akan terus mengalami penurunan yang signifikan seiring berjalan waktu, hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya berbagai macam aktivitas atau proses pemerintahan, dan sejalan dengan hal tersebut maka tidak dapat dipungkiri penurunan aset tetap akan terus berlanjut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengkajian laporan keuangan terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng memang benar adanya telah sesuai dan mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyajikan beberapa poin yang mencakup komponen-komponen berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pendataan mendetil atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hanya menyajikan lima komponen laporan keuangan dan tidak menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas karena untuk saldo anggaran lebih disajikan oleh bendahara umum daerah/kabupaten, begitupula dengan laporan arus kas segala aliran kas baik yang masuk kedalam instansi maupun yang keluar dari instansi telah didata dengan spesifik dan akurat, dan selanjutnya disajikan oleh bendahara umum daerah/kabupaten.

Penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng terbukti telah benar dalam hal pengaplikasian basis akrual dan basis kas. Basis akrual yang digunakan dalam pelaporan keuangan untuk

pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan, basis kas untuk pendapatan LRA dan belanja.

Dapat dilihat pula mengenai data yang telah disediakan, dan ditelaah sebelumnya, bahwa pada aset tetap terdapat adanya penambahan item laporan keuangan yang tersaji dan membahas mengenai akumulasi penyusutan karena aset tentu saja akan terus disusutkan selama daya tampung tersebut terus mengalami penurunan, yang disebabkan oleh berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas pemerintahan berupa operasi yang selama pelaksanaannya berjalan, akan memakan dana, beriringan dengan hal tersebut maka sudah jelas aset tetap pada akhirnya akan berkurang secara terus-menerus.

5.2 Saran

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mungkin bisa lebih baik lagi jika instansi yang bersangkutan dapat menyediakan lebih banyak lagi komponen ataupun unsur-unsur laporan keuangan berupa perubahan saldo anggaran dan dana lebih, disusul dengan adanya laporan arus kas. Memang benar kedua hal tersebut tidak termasuk dalam laporan catatan laporan keuangan (CaLK), tapi tetap saja, keberadaan hal tersebut masih bisa diangkat dan dijadikan sebagai pendataan ataupun semacam arsip instansi yang suatu saat nanti dibutuhkan untuk beberapa alasan tertentu.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diharapkan Instansi bisa lebih meningkatkan pelaporan keuangan yang disajikan agar dapat dipahami bagi para peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- Diana Sari. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Universitas Widyatama Bandung. Bandung
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliam Chandra Liwong Odekamaru, Ventje Ilat, Harianto Sabijono. 2015. *Peralihan PP Nomor 24 Tahun 2005 ke PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Republik Indonesia.
- Kasmir, 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Och Fajar Arif Trianto. 2018. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Studi Kasus pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Jawa Timur
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Putriasri Pujanira. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rusmanto. 2006. *Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan terhadap Penggunaannya dalam Pengambilan Keputusan Kredit Bank di Banjarmasin*. ISSN 1411-0393
- Sartika. 2019. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim*. Universitas Muhammadiyah Palembang. Sumatera Selatan.
- Sarwenda Biduri. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yuningsih, Amelia Tirta. 2018. *Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar*. Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar. Sulawesi Selatan.

Wikipedia, 2020. Artikel Laporan Keuangan, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.





LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Uraian	Jumlah		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	3,500,000.00	1,016,000.00	2,484,000.00	29.03
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3,500,000.00	1,016,000.00	2,484,000.00	29.03
4.1.02.23	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga - LRA	3,500,000.00	1,016,000.00	2,484,000.00	29.03
4.1.02.23.01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	3,500,000.00	1,016,000.00	2,484,000.00	29.03
4.1.04	Lain - Lain PAD Yang Sah - LRA	0.00	0.00	0.00	0
4.1.04.13	Pendapatan Dari Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0
4.1.04.13.05	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka	0.00	0.00	0.00	0
4.1.04.13.06	Pendapatan dari Pengembalian LS	0.00	0.00	0.00	0
Tot		3,500,000.00	1,016,000.00	2,484,000.00	29.03
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	314,212,386,893.07	307,795,787,828.00	6,416,599.07	97.96
5.1.01	Belanja Pegawai	273,737,466,566.67	269,710,393,819.00	4,027,072.67	98.53
5.1.01.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	177,934,173,566.67	176,354,583,164.00	1,579,590.67	99.11
5.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	146,217,797,418.00	144,944,403,776.00	1,273,393.00	99.13
5.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga	11,618,612,936.00	11,481,958,768.00	136,654.10	98.82
5.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan	216,412,700.00	204,721,000.00	11,691.70	94.60
5.1.01.01.04	Tunjangan Fungsional	12,892,004,510.00	12,739,237,300.00	152,767.20	98.82
5.1.01.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	413,100,100.00	385,434,000.00	27,666.10	93.30
5.1.01.01.06	Tunjangan Beras	5,118,895,208.00	5,405,573,640.00	(286,678.40)	105.60
5.1.01.01.07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	0.00	0.00	0.00	0
5.1.01.01.08	Pembulatan Gaji	1,887,062.67	1,684,477.00	202,585.67	89.26
5.1.01.01.23	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	1,455,463,632.00	1,191,570,203.00	263,893.40	81.87
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	90,441,990,000.00	88,034,765,155.00	2,407,224.00	97.34
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	402,000,000.00	228,000,000.00	174,000.00	56.72
5.1.01.02.07	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru PNSD	89,514,990,000.00	87,373,015,155.00	2,141,974.00	97.61
5.1.01.02.08	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	525,000,000.00	433,750,000.00	91,250.00	82.62
5.1.01.12	Belanja Pegawai Dana BOS	5,361,303,000.00	5,321,045,500.00	40,257.50	99.25
5.1.01.12.01	Belanja Pegawai Dana BOS	5,361,303,000.00	5,321,045,500.00	40,257.50	99.25
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	40,474,920,326.40	38,085,394,009.00	2,389,526.40	94.10
5.1.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	487,610,750.00	487,585,350.00	25,400.00	99.99
5.1.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	333,471,000.00	333,460,600.00	10,400.00	100.00
5.1.02.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery	4,490,000.00	4,490,000.00	0.00	100.00
5.1.02.01.04	Belanja Prangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	100.00
5.1.02.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15,114,750.00	15,114,750.00	0.00	100.00
5.1.02.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	500,000.00	495,000.00	5,000.00	99.00
5.1.02.01.09	Belanja Peralatan Rumah Tangga	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00
5.1.02.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,212,000.00	4,212,000.00	0.00	100.00
5.1.02.01.11	Belanja Seminar Kit	124,023,000.00	124,013,000.00	10,000.00	99.99
5.1.02.02	Belanja Bahan / Material	335,375,500.00	332,376,900.00	2,998,600.00	99.11
5.1.02.02.04	Belanja Bahan Obat - Obatan	14,507,300.00	12,262,300.00	2,245,000.00	84.53
5.1.02.02.07	Belanja Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan	20,276,500.00	20,280,900.00	(4,400.00)	99.92
5.1.02.02.08	Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,591,700.00	299,853,700.00	738,000.00	99.75

Halaman 1

5.1.02.03	Belanja Jasa Kantor	1,189,557,500.00	1,143,328,603.00	46,228,89	96.11
5.1.02.03.01	Belanja Telepon	12,669,500.00	10,388,750.00	2,280,750.	82.00
5.1.02.03.02	Belanja Air	20,170,000.00	12,928,350.00	7,241,650.	64.10
5.1.02.03.03	Belanja Listrik	177,402,000.00	153,550,757.00	23,851,24	86.56
5.1.02.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
5.1.02.03.05	Belanja Surat Kabar/ Majalah	1,020,000.00	0.00	1,020,000.	0
5.1.02.03.06	Belanja Kawa/ Faksimil/ Internet	64,596,000.00	56,560,746.00	8,035,254.	87.56
5.1.02.03.15	Belanja Jasa Transportasi	195,700,000.00	195,200,000.00	500,000.0	99.74
5.1.02.03.18	Belanja Jasa Cleaning Service	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	100.00
5.1.02.03.19	Belanja Jasa Pramubakti	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
5.1.02.03.23	Belanja Jasa Buruh/Tenaga Lapangan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	100.00
5.1.02.03.27	Belanja Jasa Petugas Jaga	152,400,000.00	149,100,000.00	3,300,000.	97.83
5.1.02.03.28	Belanja Jasa Operator Peralatan/Mesin	460,200,000.00	460,200,000.00	0.00	100.00
5.1.02.03.30	Belanja Jasa Administrasi Kantor	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	100.00
5.1.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66,447,380.00	56,713,050.00	9,734,330.	85.35
5.1.02.05.01	Belanja Jasa Service	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	100.00
5.1.02.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24,000,000.00	23,965,000.00	35,000.00	99.85
5.1.02.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas	20,667,380.00	15,920,050.00	4,747,330.	77.03
5.1.02.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14,280,000.00	9,328,000.00	4,952,000.	65.32
5.1.02.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	524,959,425.00	523,421,100.00	1,538,325.	99.71
5.1.02.06.01	Belanja Cetak	221,583,000.00	220,127,000.00	1,456,000.	99.34
5.1.02.06.02	Belanja Penggandaan	295,442,575.00	295,379,100.00	63,475.00	99.98
5.1.02.06.03	Belanja Jilid	7,933,850.00	7,915,000.00	18,850.00	99.76
5.1.02.07	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	3,135,000.00	3,135,000.00	0.00	100.00
5.1.02.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	3,135,000.00	3,135,000.00	0.00	100.00
5.1.02.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
5.1.02.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0.00	0.00	0.00	0
5.1.02.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
5.1.02.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional	0.00	0.00	0.00	0
5.1.02.10.07	Belanja sewa sound system	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
5.1.02.11	Belanja Makanan Dan Minuman	419,334,000.00	352,598,630.00	66,735,37	84.09
5.1.02.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	53,800,000.00	53,575,650.00	224,350.0	99.58
5.1.02.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97,571,000.00	75,991,000.00	21,580,00	77.88
5.1.02.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	267,963,000.00	223,031,980.00	44,931,02	83.23
5.1.02.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu	0.00	0.00	0.00	0
5.1.02.14.10	Belanja Pakaian Seragam Kontingen	0.00	0.00	0.00	0
5.1.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	268,940,000.00	193,836,000.00	75,104,00	72.07
5.1.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101,000,000.00	88,500,000.00	12,400,00	87.72
5.1.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167,940,000.00	105,236,000.00	62,704,00	62.66
5.1.02.18	Belanja Pemeliharaan	91,919,500.00	91,891,300.00	28,200.00	99.97
5.1.02.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	48,919,500.00	48,919,500.00	0.00	100.00
5.1.02.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00
5.1.02.18.04	Belanja Pemeliharaan Jasa, Irigasi Dan Jaringan	40,000,000.00	39,971,800.00	28,200.00	99.93
5.1.02.20	Belanja Barang Untuk Diteruskan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	2,643,295,000.00	2,633,519,400.00	9,775,600.	99.63
5.1.02.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diteruskan Kepada Masyarakat	2,643,295,000.00	2,633,519,400.00	9,775,600.	99.63
5.1.02.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	100.00
5.1.02.23.04	Belanja Kepesertaan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	100.00
5.1.02.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	871,680,000.00	869,400,000.00	2,280,000.	99.74
5.1.02.24.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	871,680,000.00	869,400,000.00	2,280,000.	99.74
5.1.02.25	Honorarium PNS	60,000,000.00	28,450,000.00	31,550,00	47.42
5.1.02.25.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60,000,000.00	28,450,000.00	31,550,00	47.42

5.1.02.27	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga Masyarakat	9,879,445,000.00	9,859,225,000.00	20,220.00	99.80
5.1.02.27.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	100.00
5.1.02.27.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9,874,945,000.00	9,854,725,000.00	20,220.00	99.80
5.1.02.28	Belanja Barang Lainnya	592,110,000.00	533,835,700.00	58,274.30	90.16
5.1.02.28.01	Belanja Barang Non Aset Tetap	592,110,000.00	533,835,700.00	58,274.30	90.16
5.1.02.31	Belanja Barang Dana BOS	17,659,590,271.40	15,948,770,765.00	1,710,819.00	90.31
5.1.02.31.01	Belanja Barang Dana BOS	17,659,590,271.40	15,948,770,765.00	1,710,819.00	90.31
5.1.02.39	Belanja Peralatan	5,372,521,000.00	5,018,307,211.00	354,213.70	93.41
5.1.02.39.04	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,775,000.00	26,775,000.00	0.00	100.00
5.1.02.39.06	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sekolah/ Fasilitas Pendidikan	5,345,746,000.00	4,991,532,211.00	354,213.70	93.37
5.2	Belanja Modal	52,278,525,667.00	50,073,762,353.00	2,204,763.00	95.78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	16,899,226,225.00	16,661,672,000.00	237,554.20	98.59
5.2.02.14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	100.00
5.2.02.14.05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	100.00
5.2.02.15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	488,000,000.00	488,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	488,000,000.00	488,000,000.00	0.00	100.00
5.2.02.16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66,483,725.00	62,026,000.00	4,457,725.00	93.30
5.2.02.16.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	66,483,725.00	62,026,000.00	4,457,725.00	93.30
5.2.02.17	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	147,750,000.00	147,750,000.00	0.00	100.00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	77,700,000.00	77,700,000.00	0.00	100.00
5.2.02.17.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	100.00
5.2.02.17.03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00	100.00
5.2.02.23	Belanja Modal Pengadaan Unit - Unit Laboratorium	0.00	0.00	0.00	0
5.2.02.23.55	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	0.00	0.00	0.00	0
5.2.02.24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah	16,157,392,500.00	15,924,296,000.00	233,096.50	98.56
5.2.02.24.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain - Lain	16,157,392,500.00	15,924,296,000.00	233,096.50	98.56
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	26,350,420,000.00	26,348,339,300.00	2,080,700.00	99.99
5.2.03.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	26,030,420,000.00	26,030,420,000.00	0.00	100.00
5.2.03.01.10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	26,030,420,000.00	26,030,420,000.00	0.00	100.00
5.2.03.04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	20,000,000.00	19,876,500.00	123,500.00	99.38
5.2.03.04.03	Belanja Modal Pengadaan Rumah Peninggalan Sejarah	20,000,000.00	19,876,500.00	123,500.00	99.38
5.2.03.20	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	300,000,000.00	298,042,800.00	1,957,200.00	99.35
5.2.03.20.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	300,000,000.00	298,042,800.00	1,957,200.00	99.35
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	30,000,000.00	29,576,500.00	423,500.00	98.59
5.2.04.11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	30,000,000.00	29,576,500.00	423,500.00	98.59
5.2.04.11.05	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya	30,000,000.00	29,576,500.00	423,500.00	98.59
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0
5.2.05.01	Belanja Modal Pengadaan Buku	0.00	0.00	0.00	0
5.2.05.01.01	Belanja Modal Pengadaan Umum	0.00	0.00	0.00	0
5.2.05.01.06	Belanja Modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan Alam	0.00	0.00	0.00	0
5.2.07	Belanja Modal Dana BOS	8,998,879,442.00	7,034,174,553.00	1,964,704.00	78.17
5.2.07.01	Belanja Modal Dana BOS	8,998,879,442.00	7,034,174,553.00	1,964,704.00	78.17
5.2.07.01.01	Belanja Modal Dana BOS	0.00	0.00	0.00	0
5.2.07.01.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	8,976,968,442.00	7,029,248,553.00	1,947,719.00	78.30
5.2.07.01.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	21,911,000.00	4,926,000.00	16,985.00	22.48
Tot		366,490,912,560.07	357,869,550,181.00	8,621,360.00	97.65
Sur		-366,487,412,560.07	-357,868,534,181.00	-	
Sis		-366,487,412,560.07	-357,868,534,181.00	-	

Lampiran 2: Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NERACA
per Desember 2020

KETERANGAN	Tahun		KENAIKAN/PENURUNAN
	2020	2019	
1 Aset			
1.1 Aset Lancar	3,731,529,453.40	3,704,909,210.06	26,620,243.34
1.1.01 Kas Dan Setara Kas	3,711,601,845.40	3,668,972,713.40	42,629,132.00
1.1.01.03 Kas Di Bendaha Pengeluaran	0.00	0.00	0.00
1.1.01.03.01 Kas Di Bendaha Pengeluaran	-	-	-
1.1.01.05 Kas Lainnya	10,042,122.00	0.00	10,042,122.00
1.1.01.05.01 Kas Lainnya	10,042,122.00	-	10,042,122.00
1.1.01.08 Kas Dana Bos	3,701,559,723.40	3,668,972,713.40	32,587,010.00
1.1.01.08.01 Kas Dana Bos SD Negeri	2,625,805,457.40	2,683,176,841.40	(57,371,384.00)
1.1.01.08.02 Kas Dana Bos SMP Negeri	1,075,754,266.00	985,795,872.00	89,958,394.00
1.1.03 Piutang Pendapatan	0.00	19,345,567.00	(19,345,567.00)
1.1.03.04 Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah	0.00	19,345,567.00	(19,345,567.00)
1.1.03.04.09 Piutang Dari Pengembalian	-	19,345,567.00	(19,345,567.00)
1.1.05 Penyisihan Piutang	0.00	(96,727.84)	96,727.84
1.1.05.02 Penyisihan Piutang Lainnya	0.00	(96,727.84)	96,727.84
1.1.05.02.06 Penyisihan Piutang Lainnya	-	(96,727.84)	96,727.84
1.1.06 Beban Dibayar Di Muka	6,663,708.00	5,182,707.50	1,481,000.50
1.1.06.03 Beban Jasa Dibayar Di Muka	6,663,708.00	5,182,707.50	1,481,000.50
1.1.06.03.01 Beban Jasa Dibayar Di Muka	6,663,708.00	5,182,707.50	1,481,000.50
1.1.07 Persediaan	13,263,900.00	11,504,950.00	1,758,950.00
1.1.07.01 Barang Pakai Habis	13,263,900.00	11,504,950.00	1,758,950.00
1.1.07.01.01 Bahan	-	-	-
1.1.07.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	13,263,900.00	11,504,950.00	1,758,950.00
1.1.07.01.04 Obat-obatan	-	-	-
1.1.07.01.05 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-
1.3 Aset Tetap	355,188,884,127.86	325,726,598,695.82	29,462,285,432.04
1.3.01 Tanah	83,673,431,016.24	83,668,676,216.24	4,754,800.00
1.3.01.01 Tanah	83,673,431,016.24	83,668,676,216.24	4,754,800.00
1.3.01.01.01 Tanah Persil	83,600,769,762.24	83,596,014,962.24	4,754,800.00
1.3.01.01.03 Lapangan	72,661,254.00	72,661,254.00	-
1.3.02 Peralatan Dan Mesin	73,015,974,111.97	48,535,444,504.97	24,480,529,607.00
1.3.02.01 Alat Besar	0.00	0.00	0.00
1.3.02.01.03 Alat Bantu	-	-	-
1.3.02.02 Alat Angkutan	1,874,316,300.00	1,874,316,300.00	0.00
1.3.02.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor	1,873,826,300.00	1,873,826,300.00	-
1.3.02.02.02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	490,000.00	490,000.00	-
1.3.02.03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur	13,646,000.00	13,646,000.00	0.00
1.3.02.03.01 Alat Bengkel Bermesin	7,690,000.00	7,690,000.00	-
1.3.02.03.02 Alat Bengkel Tak Bermesin	396,000.00	396,000.00	-
1.3.02.03.03 Alat Ukur	5,560,000.00	5,560,000.00	-
1.3.02.04 Alat Pertanian	564,601,139.00	564,601,139.00	0.00

KETERANGAN	Tahun		KENAIKANI-PENURUNAN	
	2020	2019		
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	564,601,139.00	564,601,139.00	-
1.3.02.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	24,769,342,550.25	18,673,776,015.25	6,095,566,535.00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	12,337,190,460.41	7,705,658,105.41	4,631,532,355.00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	12,247,542,089.84	10,783,507,909.84	1,464,034,180.00
1.3.02.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	184,610,000.00	184,610,000.00	-
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	2,716,796,649.00	2,651,594,149.00	65,202,500.00
1.3.02.06.01	Alat Studio	2,406,576,149.00	2,341,373,649.00	65,202,500.00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	140,855,500.00	140,855,500.00	-
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	169,365,000.00	169,365,000.00	-
1.3.02.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	51,353,270.00	50,153,270.00	1,200,000.00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	51,353,270.00	50,153,270.00	1,200,000.00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	13,384,631,594.98	9,828,867,474.98	3,555,764,120.00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	233,022,846.00	60,318,226.00	172,704,620.00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	13,151,608,748.98	9,768,549,248.98	3,383,059,500.00
1.3.02.10	Komputer	28,453,438,400.74	13,931,452,248.74	14,521,986,152.00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	25,065,853,501.41	11,195,641,068.41	13,870,212,433.00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	3,387,584,899.33	2,735,811,180.33	651,773,719.00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	9,610,000.00	1,500,000.00	8,110,000.00
1.3.02.15.01	Alat Deteksi	-	-	-
1.3.02.15.03	Alat Sar	9,610,000.00	1,500,000.00	8,110,000.00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	-	-	-
1.3.02.18	Rambu - Rambu	0.00	0.00	0.00
1.3.02.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	-	-
1.3.02.19	Peralatan Olah Raga	1,178,238,208.00	945,537,908.00	232,700,300.00
1.3.02.19.01	Peralatan Olah Raga	1,178,238,208.00	945,537,908.00	232,700,300.00
1.3.03	Gedung Dan Bangunan	349,127,864,011.58	325,004,083,633.58	24,123,780,378.00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	344,862,365,762.58	320,738,585,384.58	24,123,780,378.00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	319,655,738,158.59	295,964,370,780.59	23,691,367,378.00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25,206,627,603.99	24,774,214,603.99	432,413,000.00
1.3.03.02	Monumen	4,265,498,249.00	4,265,498,249.00	0.00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	4,265,498,249.00	4,265,498,249.00	-
1.3.04	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	526,526,110.00	496,949,610.00	29,576,500.00
1.3.04.02	Bangunan Air	40,411,035.00	40,411,035.00	0.00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	25,000,000.00	25,000,000.00	-
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	15,411,035.00	15,411,035.00	-
1.3.04.03	Instalasi	118,136,500.00	88,560,000.00	29,576,500.00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	118,136,500.00	88,560,000.00	29,576,500.00
1.3.04.04	Jaringan	367,978,575.00	367,978,575.00	0.00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	10,000,000.00	10,000,000.00	-
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	323,168,575.00	323,168,575.00	-
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	34,810,000.00	34,810,000.00	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	7,982,880,972.65	7,946,668,772.65	36,212,200.00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	4,953,918,021.05	4,953,318,021.05	600,000.00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	4,699,114,607.05	4,699,514,607.05	600,000.00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	237,974,774.00	237,974,774.00	-
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	16,828,640.00	16,828,640.00	-
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2,921,962,951.60	2,886,350,751.60	35,612,200.00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	2,619,167,542.00	2,583,555,342.00	35,612,200.00

KETERANGAN	Tahun		KENAIKANI-PENURUNAN
	2020	2019	
1.3.05.02.02 Alat Bercorak Kebudayaan	301,795,409.60	301,795,409.60	-
1.3.05.02.03 Tanda Penghargaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1.3.05.03 Hewan	0.00	0.00	0.00
1.3.05.03.01 Hewan Piaraan	-	-	-
1.3.05.04 Biota Perairan	0.00	0.00	0.00
1.3.05.04.03 Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	-	-	-
1.3.05.04.04 Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	-	-	-
1.3.05.04.07 Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	-	-	-
1.3.05.07 Aset Tetap Dalam Renovasi	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00
1.3.05.07.01 Aset Tetap Dalam Renovasi	107,000,000.00	107,000,000.00	-
1.3.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
1.3.06.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
1.3.06.01.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
1.3.07 Akumulasi Penyusutan	(159,137,792,094.58)	(139,925,224,041.62)	(19,212,568,052.96)
1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(49,346,769,296.16)	(40,436,238,455.31)	(8,910,530,840.85)
1.3.07.01.02 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1,874,316,300.00)	(1,816,601,728.49)	(57,714,571.51)
1.3.07.01.03 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(12,880,000.00)	(12,386,000.00)	(494,000.00)
1.3.07.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(544,984,656.50)	(504,877,437.00)	(40,107,219.50)
1.3.07.01.05 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(18,156,381,622.25)	(15,945,193,779.25)	(2,211,187,843.00)
1.3.07.01.06 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(2,228,127,505.00)	(2,042,926,517.00)	(185,200,988.00)
1.3.07.01.07 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(45,857,270.00)	(43,379,270.00)	(2,478,000.00)
1.3.07.01.08 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(10,553,248,144.25)	(9,600,306,365.99)	(952,941,778.26)
1.3.07.01.09 Akumulasi Penyusutan Alat Pensejataan	-	-	-
1.3.07.01.10 Akumulasi Penyusutan Komputer	(14,913,298,056.74)	(9,590,330,149.58)	(5,322,967,907.16)
1.3.07.01.13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-
1.3.07.01.14 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-
1.3.07.01.15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(5,555,000.00)	(1,500,000.00)	(4,055,000.00)
1.3.07.01.16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-	-
1.3.07.01.17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-
1.3.07.01.18 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	-	-	-
1.3.07.01.19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(1,012,120,741.42)	(878,737,208.00)	(133,383,533.42)
1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(106,870,387,584.84)	(96,889,381,239.87)	(9,981,006,344.97)
1.3.07.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(105,916,879,116.57)	(96,011,339,065.84)	(9,905,540,050.73)
1.3.07.02.02 Akumulasi Penyusutan Monumen	(953,508,468.27)	(878,042,174.03)	(75,466,294.24)
1.3.07.02.04 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	-	-	-
1.3.07.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(149,760,040.48)	(133,901,765.84)	(15,858,274.64)
1.3.07.03.02 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(11,337,011.66)	(10,323,310.48)	(1,013,701.18)
1.3.07.03.03 Akumulasi Penyusutan Instalasi	(16,712,550.00)	(12,587,999.98)	(4,124,550.02)
1.3.07.03.04 Akumulasi Penyusutan Jaringan	(121,710,478.82)	(110,990,455.38)	(10,720,023.44)
1.3.07.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2,770,875,173.10)	(2,465,702,580.60)	(305,172,592.50)
1.3.07.04.01 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(2,770,875,173.10)	(2,465,702,580.60)	(305,172,592.50)

KETERANGAN	Tahun		KENAIKANI-PENURUNAN
	2020	2019	
1.3.07.04.02 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-
1.5 Aset Lainnya	2,626,173,007.86	2,753,428,226.18	(127,255,218.32)
1.5.03 Aset Tidak Berwujud	0.00	10,800,000.00	(10,800,000.00)
1.5.03.05 Aset Tidak Berwujud Lainnya	218,790,000.00	218,790,000.00	0.00
1.5.03.05.01 Software	218,790,000.00	218,790,000.00	-
1.5.03.06 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(218,790,000.00)	(207,990,000.00)	(10,800,000.00)
1.5.03.06.05 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(218,790,000.00)	(207,990,000.00)	(10,800,000.00)
1.5.04 Aset Lain-Lain	10,003,758,811.19	10,003,758,811.19	0.00
1.5.04.01 Aset Lain-Lain	10,003,758,811.19	10,003,758,811.19	0.00
1.5.04.01.01 Aset Lain-Lain	10,003,758,811.19	10,003,758,811.19	-
1.5.05 Akumulasi Penyusutan Aset Lain	(7,377,585,803.33)	(7,261,130,585.01)	(116,455,218.32)
1.5.05.01 Akumulasi Penyusutan Aset Lain	(7,377,585,803.33)	(7,261,130,585.01)	(116,455,218.32)
1.5.05.01.01 Akumulasi Penyusutan Aset Lain	(7,377,585,803.33)	(7,261,130,585.01)	(116,455,218.32)
TOTAL ASET	361,546,586,589.12	332,184,936,132.06	29,361,650,457.06
2 Kewajiban			
2.1 Kewajiban Jangka Pendek	83,067,406.00	48,219,552.00	34,847,854.00
2.1.01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	10,042,122.00	0.00	10,042,122.00
2.1.01.03 Utang PPh Pusat	1,985,900.00	0.00	1,985,900.00
2.1.01.03.01 Utang PPh 21	1,852,200.00	-	1,852,200.00
2.1.01.03.02 Utang PPh 22	-	-	-
2.1.01.03.03 Utang PPh 23	133,700.00	-	133,700.00
2.1.01.04 Utang PPN Pusat	8,056,222.00	0.00	8,056,222.00
2.1.01.04.01 Utang PPN Pusat	8,056,222.00	-	8,056,222.00
2.1.05 Utang Belanja	73,025,284.00	48,219,552.00	24,805,732.00
2.1.05.01 Utang Belanja Pegawai	63,393,990.00	29,930,166.00	33,463,824.00
2.1.05.01.01 Utang Belanja Gaji Dan Tunjangan	63,393,990.00	29,930,166.00	33,463,824.00
2.1.05.02 Utang Belanja Barang Dan Jasa	9,631,294.00	18,289,386.00	(8,658,092.00)
2.1.05.02.01 Utang Belanja Jasa	9,631,294.00	18,289,386.00	(8,658,092.00)
2.1.05.03 Utang Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
2.1.05.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-	-	-
2.1.05.03.03 Utang Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-	-
2.1.05.03.04 Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-
2.1.05.03.05 Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
2.1.05.03.16 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	-	-	-
2.1.05.03.19 Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	-	-	-
2.1.05.08 Utang Persediaan	0.00	0.00	0.00
2.1.05.08.01 Utang Persediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-
2.1.05.08.02 Utang Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	-	-
2.1.05.08.03 Utang Persediaan peranko, materai dan benda pos lainnya	-	-	-
2.1.05.08.04 Utang Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-	-
2.1.05.08.14 Utang Persediaan Barang diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
2.1.05.08.15 Utang Persediaan Barang diserahkan Pihak Ketiga	-	-	-
2.1.06 Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00
2.1.06.05 Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00

KETERANGAN	Tahun		KENAIKANI-PENURUNAN
	2020	2019	
2.1.06.05.01 Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
Jumlah Kewajiban	83,067,406.00	48,219,552.00	34,847,854.00
3 Ekuitas			
3.1 Ekuitas	361,463,519,183.12	332,136,716,580.06	29,326,802,603.06
Jumlah Ekuitas	361,463,519,183.12	332,136,716,580.06	29,326,802,603.06
TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS	361,546,586,589.12	332,184,936,132.06	29,361,650,457.06

UNIVERSITAS

BOSOWA

Lampiran 3: Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG				
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
LAPORAN OPERASIONAL				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2020				
URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	1,016,000.00	2,476,000.00	(1,460,000.00)	(143.70)
8.1.02.23.04 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	1,016,000.00	2,476,000.00	(1,460,000.00)	(143.70)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0.00	13,819,000.00	(13,819,000.00)	100
8.1.04.13.06 Pendapatan Dari Pengembalian LS - LO	0.00	-	-	100
8.1.04.13.08 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa-LO	0.00	13,819,000.00	(13,819,000.00)	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1,016,000.00	16,295,000.00	(15,279,000.00)	
Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
Pendapatan Hibah	1,096,779,000.00	877,113,120.00	219,665,880.00	20.03
8.3.01.01.03 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat-LO	1,096,779,000.00	877,113,120.00	219,665,880.00	20.03
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1,096,779,000.00	877,113,120.00	219,665,880.00	
JUMLAH PENDAPATAN	1,097,795,000.00	893,408,120.00	204,386,880.00	
BEBAN				
Beban Pegawai	269,772,307,643.00	289,178,075,327.00	(19,405,767,684.00)	(7.19)
9.1.01.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO	144,974,699,576.00	153,207,887,168.00	(8,233,187,592.00)	(5.88)
9.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga - LO	11,485,126,792.00	12,194,645,631.00	(709,518,839.00)	(6.18)
9.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan - LO	204,721,000.00	167,245,000.00	37,476,000.00	18.31
9.1.01.01.04 Tunjangan Fungsional - LO	12,739,237,300.00	13,315,876,300.00	(576,639,000.00)	(4.53)
9.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum - LO	385,434,000.00	535,305,000.00	(149,871,000.00)	(38.88)
9.1.01.01.06 Tunjangan Beras - LO	5,405,573,640.00	5,768,977,200.00	(363,403,560.00)	(6.72)
9.1.01.01.08 Pembulatan Gaji - LO	1,684,477.00	1,818,429.00	(133,952.00)	(7.95)
9.1.01.01.25 Juran Jaminan Ketenagakerjaan - LO	1,191,570,203.00	1,259,039,179.00	(67,468,976.00)	(5.66)
9.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	228,000,000.00	214,500,000.00	13,500,000.00	5.92
9.1.01.02.07 Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	87,373,015,155.00	96,629,856,420.00	(9,256,841,265.00)	(10.59)
9.1.01.02.08 Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	433,750,000.00	1,045,575,000.00	(611,825,000.00)	(141.05)
9.1.01.07.01 Uang Lembur PNS - LO	0.00	6,386,000.00	(6,386,000.00)	0
9.1.01.10.03 Insentif Tenaga Pendidik - LO	0.00	714,409,500.00	(714,409,500.00)	0
9.1.01.10.04 Insentif Tenaga Kependidikan - LO	0.00	1,025,200,000.00	(1,025,200,000.00)	0
9.1.01.11.01 Beban Pegawai Dana BOS-LO	0.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	0
9.1.01.11.03 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap BOS	3,526,157,500.00	2,191,846,000.00	1,334,311,500.00	37.84
9.1.01.11.04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS- LO	17,700,000.00	51,570,000.00	(33,870,000.00)	(191.36)
9.1.01.11.05 Beban Insentif/Remedial Guru PNS BOS	6,380,000.00	4,610,000.00	1,770,000.00	27.74
9.1.01.11.06 Beban Insentif/Remedial Guru Non PNS BOS	29,100,000.00	39,144,000.00	(10,044,000.00)	(34.52)
9.1.01.11.07 Insentif Tenaga Pendidik BOS - LO	551,719,000.00	86,586,000.00	465,133,000.00	84.31

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN	%
9.1.01.11.08 Insentif Tenaga Kependidikan BOS - LO	1,189,989,000.00	371,321,000.00	818,668,000.00	68.80
9.1.02.25.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,450,000.00	168,640,000.00	(140,190,000.00)	(492.76)
9.1.02.25.07 Honorarium PA/KPA	0.00	7,000,000.00	(7,000,000.00)	0
9.1.02.25.08 Honorarium PPK	0.00	6,600,000.00	(6,600,000.00)	0
9.1.02.25.09 Honorarium PPK-SKPD	0.00	10,800,000.00	(10,800,000.00)	0
9.1.02.25.10 Honorarium PPTK	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0
9.1.02.25.12 Honorarium Bendahara Penerima	0.00	2,600,000.00	(2,600,000.00)	0
9.1.02.25.15 Honorarium Bendahara Pengeluaran	0.00	12,000,000.00	(12,000,000.00)	0
9.1.02.25.17 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	0.00	46,140,000.00	(46,140,000.00)	0
9.1.02.25.18 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0
9.1.02.25.19 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0.00	30,125,000.00	(30,125,000.00)	0
9.1.02.25.22 Honorarium Pengelola Aplikasi Komputer	0.00	16,500,000.00	(16,500,000.00)	0
9.1.02.25.25 Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah - LO	0.00	21,872,500.00	(21,872,500.00)	0
Beban Persediaan	10,306,219,927.00	10,650,623,188.00	(344,403,261.00)	(3.34)
9.1.02.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	43,240,650.00	129,106,550.00	(85,865,900.00)	(198.58)
9.1.02.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	700,000.00	6,800,000.00	(6,100,000.00)	(871.43)
9.1.02.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5,100,000.00	5,100,000.00	-	0.00
9.1.02.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,086,750.00	6,076,700.00	6,010,050.00	49.72
9.1.02.01.09 Beban Peralatan Rumah Tangga	700,000.00	-	700,000.00	100
9.1.02.01.10 Beban Peralatan dan perlengkapan kantor	4,212,000.00	-	4,212,000.00	100
9.1.02.01.18 Beban Pengisian isi Tabung Gas	495,000.00	1,575,000.00	(1,080,000.00)	(218.18)
9.1.02.01.21 Beban Alat Tulis Kantor	288,461,000.00	259,038,300.00	29,422,700.00	10.20
9.1.02.01.23 Beban Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,790,000.00	-	3,790,000.00	100
9.1.02.01.24 Beban Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0.00	12,477,000.00	(12,477,000.00)	0
9.1.02.01.25 Beban Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,028,000.00	-	3,028,000.00	100
9.1.02.01.26 Beban Seminar Kit	124,013,000.00	45,803,000.00	78,210,000.00	63.07
9.1.02.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat - Obatan	12,262,300.00	-	12,262,300.00	100
9.1.02.02.07 Beban Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan	20,260,900.00	317,209,852.00	(296,948,952.00)	(1,465.63)
9.1.02.02.21 Beban Bahan/Peralatan Pembelian	299,853,700.00	188,936,000.00	110,917,700.00	36.99
9.1.02.02.23 Beban Bahan Obat-obatan	0.00	13,172,600.00	(13,172,600.00)	0
9.1.02.06.01 Beban Cetak	220,127,000.00	257,498,200.00	(37,371,200.00)	(16.98)
9.1.02.06.02 Beban Penggandaan	295,379,100.00	473,602,600.00	(178,223,500.00)	(60.34)
9.1.02.06.03 Beban Jilid	7,915,000.00	14,460,500.00	(6,545,500.00)	(82.70)
9.1.02.11.01 Beban Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	53,575,650.00	86,118,720.00	(32,543,070.00)	(60.74)
9.1.02.11.02 Beban Makanan Dan Minuman Rapat	75,991,000.00	166,196,000.00	(90,205,000.00)	(118.70)
9.1.02.11.03 Beban Makanan Dan Minuman Tamu	0.00	20,595,600.00	(20,595,600.00)	0
9.1.02.11.06 Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	223,031,980.00	385,763,000.00	(162,731,020.00)	(72.96)
9.1.02.14.04 Beban Pakaian Olah Raga	0.00	3,200,000.00	(3,200,000.00)	0

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN	%
9.1.02.14.08 Bebanpakaian seragam sekolah	0.00	2,165,000.00	(2,165,000.00)	0
9.1.02.14.10 Beban pakaian seragam defile	0.00	31,390,000.00	(31,390,000.00)	0
9.1.02.20.01 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2,633,519,400.00	863,078,850.00	1,770,440,550.00	67.23
9.1.02.28.06 Beban Bahan Alat Peraga dan Praktik Siswa	187,947,000.00	-	187,947,000.00	100
9.1.02.29.03 Beban Alat Tulis Kantor BOS	2,333,605,081.00	2,858,168,096.00	(524,563,015.00)	(22.48)
9.1.02.29.04 Beban Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan BOS	116,821,000.00	119,909,700.00	(3,088,700.00)	(2.64)
9.1.02.29.05 Beban Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering) BOS	136,770,750.00	55,646,528.00	81,124,222.00	59.31
9.1.02.29.06 Beban Peranko, Materi dan Benda Pos BOS	144,123,500.00	145,308,000.00	(1,184,500.00)	(0.82)
9.1.02.29.07 Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih BOS	746,884,493.00	410,945,430.00	335,939,063.00	44.98
9.1.02.29.08 Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Pelumas BOS	730,000.00	7,244,000.00	(6,514,000.00)	(892.33)
9.1.02.29.09 Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran BOS	0.00	5,135,000.00	(5,135,000.00)	0
9.1.02.29.10 Beban Pengisian Tabung Gas BOS	19,480,000.00	24,160,000.00	(4,680,000.00)	(24.02)
9.1.02.29.11 Beban Bahan Baku Bangunan BOS	207,467,500.00	29,514,600.00	177,952,900.00	85.77
9.1.02.29.12 Beban Bahan Obat-obatan BOS	75,618,200.00	31,201,800.00	44,416,400.00	58.74
9.1.02.29.13 Beban Bahan Kimia BOS	11,517,100.00	2,306,330.00	9,210,770.00	79.97
9.1.02.29.14 Beban Cetak BOS	434,633,696.00	371,377,100.00	63,256,596.00	14.55
9.1.02.29.15 Beban Penggandaan BOS	812,682,302.00	1,512,555,336.00	(699,873,034.00)	(86.12)
9.1.02.29.16 Beban Jilid BOS	33,381,098.00	25,446,852.00	7,934,246.00	23.77
9.1.02.29.17 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai BOS	97,033,700.00	22,234,500.00	74,799,200.00	77.09
9.1.02.29.18 Beban Makanan dan Minuman Rapat BOS	191,716,535.00	165,288,500.00	26,428,035.00	13.78
9.1.02.29.19 Beban Makanan dan Minuman Tamu BOS	12,330,000.00	20,315,000.00	(7,985,000.00)	(64.76)
9.1.02.29.20 Beban Makanan dan Minuman Kegiatan BOS	253,522,042.00	1,096,230,044.00	(842,708,002.00)	(332.40)
9.1.02.29.21 Beban Pakaian Olahraga BOS	10,800,000.00	10,819,000.00	181,000.00	1.68
9.1.02.29.22 Beban Pakaian Seragam Sekolah BOS	0.00	9,268,000.00	(9,268,000.00)	0
9.1.02.29.23 Beban Pakaian Seragam Lainnya BOS	11,470,000.00	2,960,000.00	8,510,000.00	74.19
9.1.02.29.24 Beban Pakaian Seragam Defile BOS	12,650,000.00	600,000.00	12,050,000.00	95.26
9.1.02.29.63 Beban Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan BOS	0.00	188,230,150.00	(188,230,150.00)	0
9.1.02.29.64 Beban Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BOS	69,854,000.00	237,717,150.00	(167,863,150.00)	(240.31)
9.1.02.29.68 Beban Dokumen/ Administrasi Tender BOS	0.00	2,815,000.00	(2,815,000.00)	0
9.1.02.29.69 Beban Peralatan Rumah Tangga BOS	57,439,500.00	6,063,600.00	51,375,900.00	89.44
Beban Jasa	9,519,276,519.00	5,768,282,616.00	3,750,993,903.00	39.40
9.1.02.03.01 Beban Jasa Telepon	10,900,610.00	7,921,082.00	2,979,528.00	27.33
9.1.02.03.02 Beban Jasa Air	14,381,250.00	7,886,250.00	6,495,000.00	45.16
9.1.02.03.03 Beban Jasa Listrik	142,927,905.00	114,968,099.00	27,959,806.00	19.56
9.1.02.03.04 Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	10,000,000.00	20,000,000.00	(10,000,000.00)	(100.00)
9.1.02.03.06 Beban Jasa Kawal/ Faksimili/ Internet	56,560,746.00	13,338,326.00	43,222,420.00	76.42
9.1.02.03.17 Beban Jasa Transportasi	195,200,000.00	276,928,000.00	(81,728,000.00)	(41.87)
9.1.02.03.20 Beban Jasa Cleaning Service	23,400,000.00	23,400,000.00	-	0.00
9.1.02.03.21 Beban Jasa Pramubakti	12,000,000.00	81,800,000.00	(69,800,000.00)	(581.67)
9.1.02.03.24 BebanJasa Buruh/Tenaga Lapangan	24,000,000.00	-	24,000,000.00	100

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN	%
9.1.02.03.28 BebanJasa Petugas Jaga	149,100,000.00	11,250,000.00	137,850,000.00	92.45
9.1.02.03.29 BebanJasa Operator Peralatan/Mesin	460,200,000.00	376,620,000.00	83,580,000.00	18.16
9.1.02.03.36 Beban Jasa Administrasi Kantor	36,000,000.00	33,000,000.00	3,000,000.00	8.33
9.1.02.07.02 Beban Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat / Penginapan	3,135,000.00	9,800,000.00	(6,665,000.00)	(212.60)
9.1.02.08.01 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0
9.1.02.10.05 Beban Sewa Tenda	4,000,000.00	-	4,000,000.00	100
9.1.02.10.06 Beban Sewa Pakaian Adat/ Tradisional	0.00	13,500,000.00	(13,500,000.00)	0
9.1.02.10.08 Bebansewa sound system	1,500,000.00	-	1,500,000.00	100
9.1.02.19.01 Beban Jasa Konsultasi Penelitian	0.00	99,880,000.00	(99,880,000.00)	0
9.1.02.23.04 Beban Kepesertaan	3,500,000.00	40,500,000.00	(37,000,000.00)	(1,057.14)
9.1.02.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	869,400,000.00	1,108,750,000.00	(239,350,000.00)	(27.53)
9.1.02.29.01 Beban Barang Dana BOS	0.00	19,610,000.00	(19,610,000.00)	0
9.1.02.29.25 Beban Telepon BOS	67,196,102.00	76,375,023.00	(9,178,921.00)	(13.66)
9.1.02.29.26 Beban Jasa Air BOS	36,750,100.00	35,800,279.00	949,821.00	2.58
9.1.02.29.27 Beban Jasa Listrik BOS	316,744,185.00	370,530,523.00	(53,786,338.00)	(16.98)
9.1.02.29.28 Beban Jasa Publikasi/Pengumuman BOS	1,775,000.00	4,425,000.00	(2,650,000.00)	(149.30)
9.1.02.29.29 Beban Surat Kabar/Majalah BOS	241,038,000.00	230,647,460.00	10,390,540.00	4.31
9.1.02.29.30 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet BOS	1,970,311,168.00	613,685,655.00	1,356,625,513.00	68.85
9.1.02.29.31 Beban Jasa Pengiriman/Paket BOS	13,630,000.00	8,780,000.00	4,850,000.00	35.58
9.1.02.29.32 Beban Jasa Transaksi Keuangan BOS	0.00	9,238,340.00	(9,238,340.00)	0
9.1.02.29.34 Beban Jasa Transportasi BOS	181,452,200.00	700,699,000.00	(519,246,800.00)	(286.16)
9.1.02.29.35 Beban Jasa Administrasi Aset BOS	0.00	4,416,250.00	(4,416,250.00)	0
9.1.02.29.36 Beban Jasa Cleaning Service BOS	26,300,000.00	37,644,000.00	(11,344,000.00)	(43.13)
9.1.02.29.37 Beban Jasa BOS	294,044,500.00	-	294,044,500.00	100
9.1.02.29.38 Beban Jasa TV Kabel BOS	3,435,000.00	4,740,000.00	(1,305,000.00)	(37.99)
9.1.02.29.39 Beban Administrasi dan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BOS	0.00	1,082,000.00	(1,082,000.00)	0
9.1.02.29.40 Beban Jasa Operator Peralatan/Mesin BOS	0.00	2,450,500.00	(2,450,500.00)	0
9.1.02.29.41 Beban Jasa Pengembangan Sistem Informasi BOS	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0
9.1.02.29.42 Beban sewa gedung/ kantor/ tempat/ penginapan BOS	0.00	11,204,400.00	(11,204,400.00)	0
9.1.02.29.43 Beban sewa ruang rapat/pertemuan BOS	0.00	455,000.00	(455,000.00)	0
9.1.02.29.44 Beban sewa Sarana Mobilitas Darat BOS	9,870,000.00	26,260,000.00	(16,390,000.00)	(166.06)
9.1.02.29.45 Beban sewa tenda BOS	2,400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	58.33
9.1.02.29.46 Beban sewa pakaian adat/tradisional BOS	4,464,000.00	111,155,500.00	(106,691,500.00)	(2,390.04)
9.1.02.29.47 Beban sewa sound system BOS	0.00	1,025,000.00	(1,025,000.00)	0
9.1.02.29.49 Beban Kursus-kursus singkat / Pelatihan BOS	7,332,000.00	6,510,000.00	822,000.00	11.21
9.1.02.29.50 Beban Bimbingan Teknis BOS	53,325,250.00	12,575,000.00	40,750,250.00	76.42
9.1.02.29.51 Beban Kepesertaan BOS	98,157,300.00	145,295,213.00	(47,137,913.00)	(48.02)
9.1.02.29.52 Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber BOS	310,715,500.00	515,033,600.00	(204,318,100.00)	(65.76)
9.1.02.29.53 Beban Jasa Lainnya BOS	277,234,900.00	567,703,116.00	(290,468,216.00)	(104.77)
9.1.02.29.65 Beban Jasa Penjemputan Tamu BOS	0.00	650,000.00	(650,000.00)	0

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN	%
9.1.02.29.67 Beban Sewa Meja Kursi BOS	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0
9.1.02.29.70 Beban Peralatan dan Perlengkapan Kantor BOS	405,142,750.00	-	405,142,750.00	100
9.1.02.29.71 Beban Barang/Peralatan Olahraga BOS	140,004,570.00	-	140,004,570.00	100
9.1.02.29.72 Beban Barang/Peralatan Kesehatan BOS	306,996,705.00	-	306,996,705.00	100
9.1.02.29.73 Beban Extracomptable Peralatan dan Mesin BOS	462,825,216.00	-	462,825,216.00	100
9.1.02.29.74 Beban Extracomptable Aset Tetap Lainnya BOS	2,249,971,562.00	-	2,249,971,562.00	100
9.1.02.29.75 Beban Jasa Pembinaan BOS	21,955,000.00	-	21,955,000.00	100
Beban Pemeliharaan	1,851,298,855.50	1,684,842,856.33	166,455,999.17	8.99
9.1.02.05.01 Beban Jasa Service	7,500,000.00	12,530,000.00	(5,030,000.00)	(67.07)
9.1.02.05.02 Beban Penggantian Suku Cadang	23,965,000.00	45,300,000.00	(21,335,000.00)	(89.03)
9.1.02.05.03 Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas	15,920,050.00	27,465,300.00	(11,545,250.00)	(72.52)
9.1.02.05.08 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,846,999.50	9,812,718.33	(1,965,718.83)	(25.05)
9.1.02.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	11,936,000.00	62,887,160.00	(50,951,160.00)	(426.87)
9.1.02.18.03 Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	3,000,000.00	416,137,600.00	(413,137,600.00)	(13,771.25)
9.1.02.18.06 Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0.00	6,300,000.00	(6,300,000.00)	0
9.1.02.29.54 Beban Jasa Service BOS	39,490,000.00	30,006,942.00	9,483,058.00	24.01
9.1.02.29.55 Beban Penggantian Suku Cadang BOS	0.00	6,855,500.00	(6,855,500.00)	0
9.1.02.29.56 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BOS	0.00	550,000.00	(550,000.00)	0
9.1.02.29.59 Beban Pemeliharaan Gedung, Halaman dan Taman BOS	1,617,328,401.00	951,053,336.00	666,275,065.00	41.20
9.1.02.29.60 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga BOS	124,312,405.00	115,189,300.00	9,123,105.00	7.34
9.1.02.29.66 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan BOS	0.00	755,000.00	(755,000.00)	0
Beban Perjalanan Dinas	1,151,811,200.00	1,873,752,460.00	(721,941,250.00)	(62.68)
9.1.02.15.01 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88,600,000.00	66,325,000.00	22,275,000.00	25.14
9.1.02.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	105,236,000.00	502,125,130.00	(396,889,130.00)	(377.14)
9.1.02.29.61 Beban perjalanan dinas dalam daerah BOS	942,040,200.00	1,274,249,820.00	(332,209,620.00)	(35.26)
9.1.02.29.62 Beban perjalanan dinas luar daerah BOS	15,935,000.00	31,052,500.00	(15,117,500.00)	(94.87)
Beban Hibah	9,859,225,000.00	9,233,000,000.00	626,225,000.00	6.35
9.1.02.27.01 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	4,500,000.00	-	4,500,000.00	100
9.1.02.27.02 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	9,854,725,000.00	9,233,000,000.00	621,725,000.00	6.31
Beban Penyusutan	18,803,223,567.72	13,944,641,562.97	4,858,582,004.75	25.84
9.1.07.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	57,714,571.42	62,211,000.01	(4,496,428.59)	(7.79)
9.1.07.01.09 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	494,000.00	494,000.00	-	0.00
9.1.07.01.13 Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan Pertanian	20,004,072.50	8,737,500.00	11,266,572.50	56.32
9.1.07.01.14 Beban Penyusutan Alat Kantor	1,278,220,209.00	439,444,516.00	838,775,693.00	65.62
9.1.07.01.15 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	928,925,634.00	878,345,016.00	50,580,618.00	5.45
9.1.07.01.16 Beban Penyusutan Peralatan Komputer	5,325,012,907.17	1,979,360,183.33	3,345,652,723.84	62.83
9.1.07.01.17 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Kerja	4,522,000.00	36,922,000.00	(32,400,000.00)	(716.50)
9.1.07.01.18 Beban Penyusutan Alat Studio	168,534,488.00	253,495,868.00	(84,961,380.00)	(50.41)
9.1.07.01.19 Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0.00	940,000.00	(940,000.00)	0

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN	%
9.1.07.01.20 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	16,666,500.00	16,666,500.00	-	0.00
9.1.07.01.21 Beban Penyusutan Alat Kedokteran	2,478,000.00	402,600.00	2,075,400.00	83.75
9.1.07.01.22 Beban Penyusutan Alat Kesehatan	0.00	2,284,000.00	(2,284,000.00)	0
9.1.07.01.23 Beban Penyusutan Unit - Unit Laboratorium	27,414,106.02	6,319,316.77	21,094,789.25	76.95
9.1.07.01.24 Beban Penyusutan Alat Peraga/ Praktek Sekolah	924,412,405.25	79,778,780.25	844,633,625.00	91.37
9.1.07.01.33 Beban Penyusutan Alat Keamanan Dan Perlindungan	4,055,000.00	-	4,055,000.00	100
9.1.07.01.34 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	107,867,766.71	-	107,867,766.71	100
9.1.07.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8,471,333,164.63	8,567,131,666.25	(95,798,501.62)	(1.13)
9.1.07.02.02 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	942,403,029.95	968,834,447.76	(26,431,417.81)	(2.80)
9.1.07.02.04 Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	0.00	16,811,730.73	(16,811,730.73)	0
9.1.07.02.07 Beban Penyusutan Monumen/ Bangunan Bersejarah	75,466,294.28	58,654,563.55	16,811,730.73	22.28
9.1.07.03.03 Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	500,000.00	500,000.00	-	0.00
9.1.07.03.07 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	513,701.16	513,701.17	(0.01)	0.00
9.1.07.03.08 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/ Baku	3,937,883.33	-	3,937,883.33	100
9.1.07.03.11 Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/ Air Bersih	0.00	2,765,333.33	(2,765,333.33)	0
9.1.07.03.20 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	333,333.33	333,333.33	-	0.00
9.1.07.03.21 Beban Penyusutan Jaringan Listrik	8,732,301.34	8,732,301.28	0.06	0.00
9.1.07.03.22 Beban Penyusutan Jaringan Telepon	1,654,388.89	1,654,388.89	-	0.00
9.1.07.04.05 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	10,800,000.00	29,558,000.00	(18,758,000.00)	(173.69)
9.1.07.05.01 Beban Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	304,772,592.50	393,397,542.50	(88,624,950.00)	(29.08)
9.1.07.06.01 Beban Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0
9.1.07.07.01 Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	116,455,218.24	129,453,273.82	(12,998,055.58)	(11.16)
Beban Lain-Lain	5,633,098,211.00	6,534,464,357.00	(901,366,146.00)	(16.00)
9.1.02.28.15 Beban Extracomtable Peralatan dan Mesin	5,556,142,911.00	138,358,750.00	5,417,784,161.00	97.51
9.1.02.28.16 Beban Extracomtable Gedung dan Bangunan	0.00	6,200,000.00	(6,200,000.00)	0
9.1.02.28.17 Beban Extracomtable Jalan Irigasi Jaringan	76,955,300.00	-	76,955,300.00	100
9.1.02.28.23 Beban Extracomtable Aset Tetap Lainnya	0.00	2,929,032,430.00	(2,929,032,430.00)	0
9.1.02.29.02 Beban Extracomtable BOS	0.00	3,460,873,177.00	(3,460,873,177.00)	0
9.1.09.03.01 Beban Lain-Lain	0.00	-	-	100
Beban Penyisihan Piutang	0.00	96,727.84	(96,727.84)	100
9.1.08.02.08 Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0.00	96,727.84	(96,727.84)	0
JUMLAH BEBAN	326,896,480,923.22	338,867,779,085.14	(11,971,318,161.92)	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-325,798,665,923.22	-337,974,370,965.14	12,175,705,041.92	
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	642,801,561.25	250,164,599.16	392,636,962.09	61.08
9.3.03.01.01 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	642,801,561.25	250,164,599.16	392,636,962.09	61.08

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN	%
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	642,801,561.25	250,164,599.16	392,636,962.09	61.08
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	642,801,561.25	250,164,599.16	392,636,962.09	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	642,801,561.25	250,164,599.16	392,636,962.09	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-326,441,467,484.47	-338,224,535,564.30	11,783,068,079.83	

Watansoppeng, 26 February 2021

Pengguna Anggaran,

Drs. H. MUH ASIS, M.Pd.I

NIP. 196410011989031014

UNIVERSITAS

BOSOWA



Lampiran 4: Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan Desember 2020

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Ekuitas	332,136,716,580.06
2	Surplus/Defisit - LO	(326,441,467,484.47)
3	Rk Ppkd	329,564,543,363.00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Kas	28,317,232,261.00
5	Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Koreksi	-
6	Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Mutasi	(1,259,264,200.00)
7	Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Perubahan Kelembagaan	-
8	Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Koreksi	(1,787,616,840.16)
9	Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Mutasi	933,278,775.85
10	Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Perubahan	-
11	Kenaikan / Penurunan Nilai Utang Belanja Akibat Koreksi	-
12	Kenaikan/ Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Lain	96,727.84
	EKUITAS AKHIR	361,463,519,183.12

Watansoppeng, 26-Feb-2021

Pengguna Anggaran,

Drs. H. MUH ASIS, M.Pd.I

NIP. 196410011989031014